

2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS KESEHATAN DIY

Jl. Gondosuli No.6 Yogyakarta Kota Yogyakarta DIY 55231

Telp. : (0274) 563153; Fax : (0274) 512368

Surel : dinkes@jogjaprovo.go.id

Laman : dinkes.jogjaprovo.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan DIY Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Kesehatan DIY Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Kesehatan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022 – 2027. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 13 Februari 2025

Kepala Dinas Kesehatan,



[Signature]
Drs. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Kesehatan DIY Tahun 2024 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian tujuan “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” :
 - Diukur dengan indikator Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Pada Balita dengan meta indikator jumlah anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) memiliki *Z-score* kurang dari -2 SD dibagi jumlah seluruh anak umur 0 sampai 59 bulan yang ditimbang di wilayah DIY pada kurun waktu /satuan waktu tertentu dikali 100%.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Sasaran Strategis, yakni Terwujudnya Keluarga Sehat dan Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah.
 - Target capaian indikator tujuan tahun 2024 sebesar 11,7%, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 10,76%. Sifat indikator yang digunakan adalah indikator *inverse*, artinya semakin kecil capaian, maka kinerja semakin bagus. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 108,03%.
 - Dibandingkan tahun 2023, capaian indikator tujuan tahun 2024 menurun 0,19 dari 10,57 menjadi 10,76 akan tetapi masih mencapai target 2024.
2. Capaian sasaran strategis 1 “Terwujudnya Keluarga Sehat”:
 - Hasil capaian indikator diperoleh dari Indeks Keluarga Sehat (IKS) Wilayah dengan menghitung jumlah keluarga sehat dengan $IKS > 0,8$ dibagi jumlah keluarga pada tahun 2024 atau dengan rumus $IKS = (\sum \text{Keluarga dengan } IKS > 0,8) / (\sum \text{Keluarga})$
 - Nilai IKS merupakan akumulasi dari nilai 12 indikator IKS, yaitu: 1) Penderita hipertensi yang berobat teratur, 2) Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan, 3) Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar, 4) Keluarga mengikuti program KB, 5) Anggota keluarga tidak ada yang merokok, 6) Keluarga sudah menjadi anggota JKN, 7) Bayi mendapatkan ASI Eksklusif, 8) Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih, 9)

Pertumbuhan Balita dipantau, 10) Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan, 11) Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga, 12) Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap.

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja dari: 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; 5) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan; dan 6) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 0,36 terealisasi 0,396 dihitung dari jumlah keluarga di DIY yang memiliki IKS lebih dari 0,8 sebesar 386.474 dibagi dengan jumlah keluarga di DIY sebesar 976.847. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 110%.
 - Dibandingkan tahun 2023 capaian IKS tahun 2024 mengalami kenaikan indeks sebesar 0,046 dari 0,35 menjadi 0,396. Sasaran strategis 1 “Terwujudnya Keluarga Sehat” dengan IKS sebagai indikator kinerja sudah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Kesehatan DIY tahun 2022 - 2027.
3. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah”:
- Hasil capaian indikator diperoleh dari hasil evaluasi penilaian reformasi birokrasi (RB) perangkat daerah yang menghasilkan kategori Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 adalah kategori A (92,75), sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi A (97,47). Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 105,09%
 - Dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 92,72, terdapat kenaikan sebesar 4,75.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kesehatan DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Kualitas kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan *Stunting* adalah tantangan utama di DIY saat ini. Telah dilakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Upaya yang telah dilakukan selama ini antara lain imunisasi bayi, persalinan di fasilitas kesehatan, pemantauan kesehatan ibu hamil, pemantauan pertumbuhan bayi balita. Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilakukan dan memberi dampak perbaikan namun demikian masih bersifat dinamis.
2. Penyakit tidak menular (PTM) di DIY semakin mendominasi dengan risiko kematian yang semakin tinggi. Faktor-faktor yang menjadi pemicu dalam hal ini adalah kebiasaan merokok, olahraga, pola makan yang sehat, dan disiplin pengobatan. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang dilakukan oleh Kemenkes RI pada tahun 2023, menyatakan bahwa DIY memiliki prevalensi tinggi dalam masalah kesehatan jiwa dan oleh karenanya tata kelola perawatan dan pengobatan rutin masih menjadi tantangan di DIY. Upaya pencegahan dan penanggulangan PTM dilaksanakan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Khusus untuk kasus gangguan jiwa, selain pemberian layanan kesehatan diperlukan upaya dalam menghilangkan stigma penderita gangguan jiwa di masyarakat.
3. Pengendalian penyakit menular di DIY telah semakin membaik namun beberapa penyakit menular masih menjadi permasalahan yaitu tuberkulosis, DBD, dan HIV. Permasalahan TBC masih menghadapi tantangan dalam upaya pengobatan dan perilaku pencegahan. Terkait dengan penyehatan lingkungan, provinsi DIY memiliki catatan capaian yang cukup baik dan menjadi pendukung penting dalam upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) di DIY.
4. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki karakteristik wilayah dengan keragaman potensi bencana dan kejadian luar biasa penyakit. Pengalaman bertahun-tahun telah memberikan referensi berharga. Tantangan di DIY saat ini adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang terlindungi dari krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	3
1.3. Isu-Isu Strategis	11
1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	14
1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	22
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	23
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	24
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	25
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	25
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	38
2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	41
BAB III Akuntabilitas Kinerja	45
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	45
3.1.1. Tujuan Perangkat Daerah	47
3.1.2. Sasaran 1: Terwujudnya Keluarga Sehat.....	49
3.1.3. Sasaran 2: Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	68
3.2. Capaian Kinerja Lainnya	77
a. SPM.....	77
b. Sustainable Development Goals (SDGs)	77
3.3. Capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap capaian sasaran Pemda DIY dan Program Pemda	79
3.4. Analisis Efisiensi Anggaran	87
3.5. Inovasi.....	88
3.6. Lintas Sektor	91
BAB IV Penutup.....	104
4.1. Kesimpulan	104
4.2. Langkah Perbaikan Kinerja	109

Daftar Tabel

Tabel I. 1 Sebaran Tenaga Medis di DIY.....	13
Tabel I. 2 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi Dinas Kesehatan DIY	14
Tabel I. 3 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi (BLKK)	15
Tabel I. 4 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes).....	15
Tabel I. 5 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi Balai Pelatihan Kesehatan (Bapel Jamkessos)	15
Tabel I. 6 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi RS Paru Respira.....	15
Tabel I. 7 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi RS Jiwa Grhasia	16
Tabel I. 8 Sarana-Prasarana.....	16
Tabel I. 9 Sarana-Prasarana BLKK.....	17
Tabel I. 10 Sarana-Prasarana Bapel Jamkessos.....	18
Tabel I. 11 Sarana-Prasarana Bapelkes	18
Tabel I. 12 Sarana-Prasarana RS Paru Respira	19
Tabel I. 13 Sarana-Prasarana RS Jiwa Grhasia	20
Tabel I. 14 Anggaran Tahun 2024	21
Tabel I. 15 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	22
Tabel II. 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kesehatan DIY, 2022-2027	24
Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	25
Tabel II. 3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024	26
Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Tujuan Dinas Kesehatan DIY Tahun 2024.....	38
Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan DIY Tahun 2024	39
Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tujuan Kepala Dinas Kesehatan DIY Tahun 2024	40
Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Sasaran Kepala Dinas Kesehatan DIY Tahun 2024.....	40
Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	45
Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2024	45
Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	47
Tabel III. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2024	47
Tabel III. 5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	49
Tabel III. 6 Rekapitulasi Indeks Keluarga Sehat Provinsi Tahun 2024	50
Tabel III. 7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	52
Tabel III. 8 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1 ...	53
Tabel III. 10 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2.....	68
Tabel III. 11 Skema dan bobot nilai Evaluasi Reformasi Perangkat Daerah	68
Tabel III. 12 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2024.....	69

Tabel III. 13 Kategori Hasil Evaluasi RB Tahun 2024 berdasar PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.....	71
Tabel III. 14 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	72
Tabel III. 15 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 2	73
Tabel III. 16 Target dan Pencapaian SPM Kesehatan DIY Tahun 2024	77
Tabel III. 17 Kontribusi Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah	79
Tabel III. 18 Kontribusi Program Dinas Kesehatan DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah	81

Daftar Gambar

Gambar I. 1 Cascading Kinerja.....	2
Gambar I. 2 Struktur Organisasi	3
Gambar I. 3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Kesehatan DIY	4
Gambar I. 4 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi BLKK	6
Gambar I. 5 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Bapeljamkessos	7
Gambar I. 6 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Bapelkes	8
Gambar I. 7 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi RS Paru Respira ...	9
Gambar I. 8 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi RS Jiwa Grhasia..	10
Gambar II. 1 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP.....	42
Gambar II. 2 Website Dinas Kesehatan DIY.....	42
Gambar II. 3 Instagram Dinas Kesehatan DIY.....	42
Gambar II. 4 SIMKIA	43
Gambar II. 5 MobScreen Penjarkes	44
Gambar II. 6 SI Semar Sehat	44
Gambar II. 7 Website Kesga.....	44
Gambar III. 1 Aplikasi e-STP	91

BAB I Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2023*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

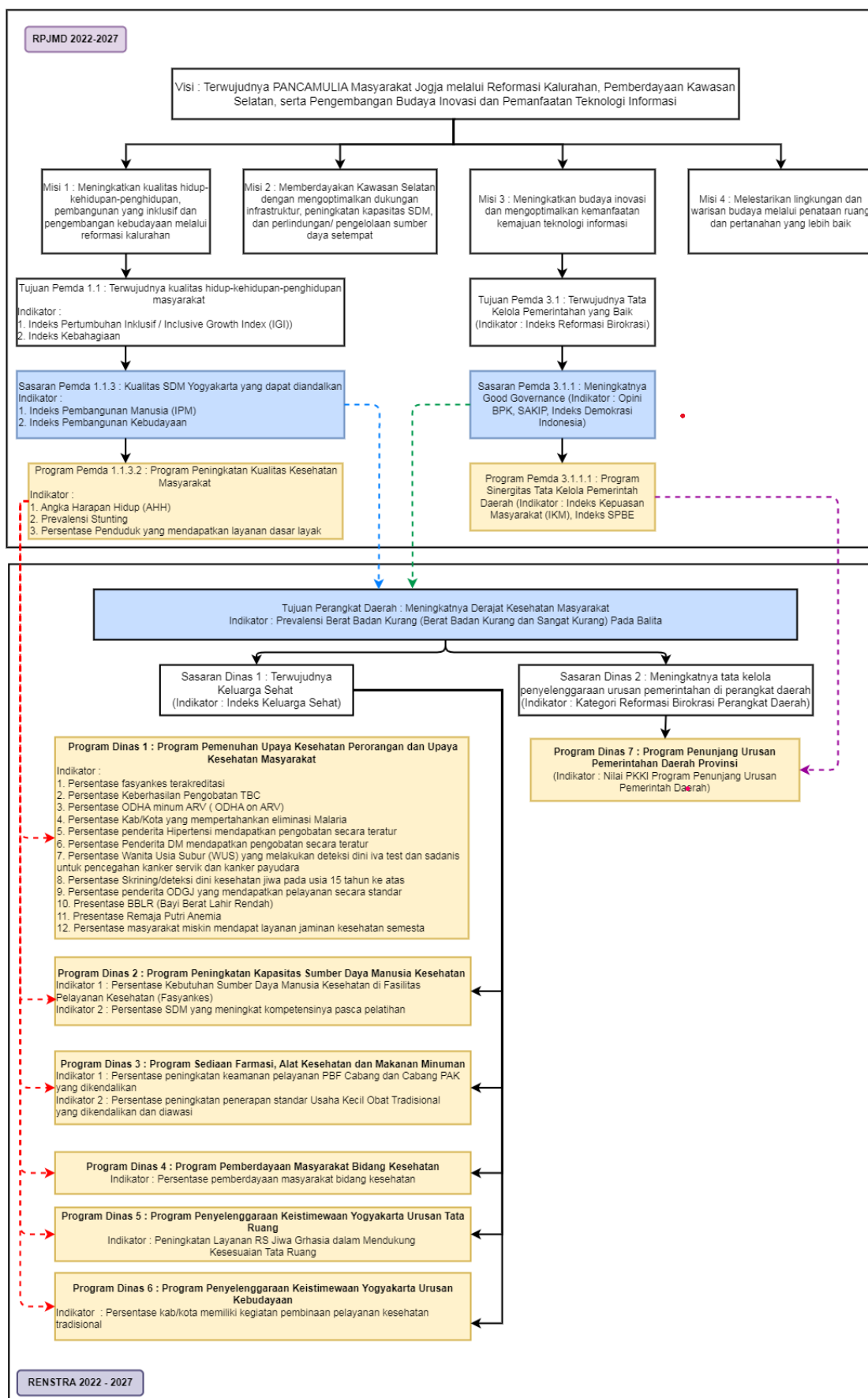
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1. *Cascading* Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027. Dinas Kesehatan DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

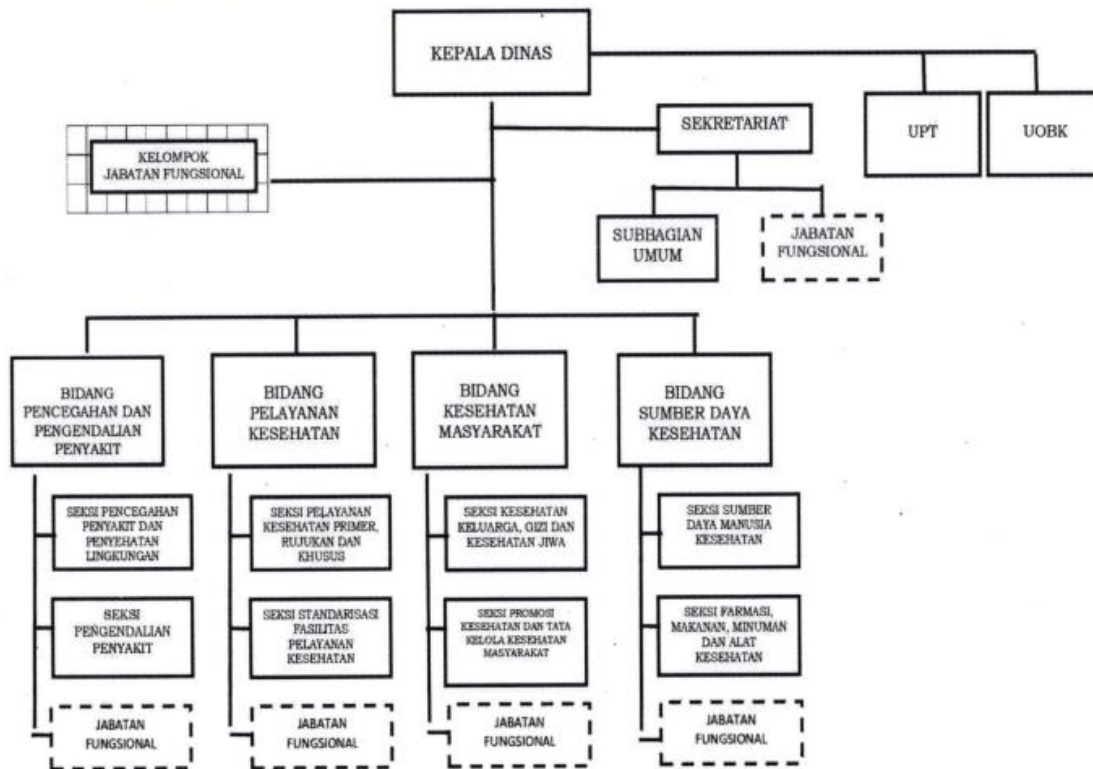
Gambar I. 1 Cascading Kinerja



Sumber: RPJMD 2022-2027, Renstra Dinas Kesehatan DIY 2022-2027

Gambar I. 2 Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN



Sumber: Lampiran PERGUB DIY Nomor 109 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD DIY 2022-2027, Dinas Kesehatan DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I. 3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 109 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja Dinas;
2. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
3. penyelenggaraan pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan, dan pengendalian penyakit;
4. penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan kesehatan khusus, standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan;
5. penyelenggaraan kesehatan masyarakat;
6. pengelolaan sumber daya manusia kesehatan;
7. pengelolaan kefarmasian dan alat kesehatan;
8. pengembangan upaya kesehatan tradisional;
9. pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan kesehatan kabupaten/kota;
10. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan kesehatan;
11. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
12. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
13. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
14. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
15. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Dinas;
16. pengelolaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
17. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
18. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
19. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Kesehatan dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Pergub DIY Nomor 15 tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub DIY Nomor 141 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Pergub DIY Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 109 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan DIY fungsi Dinas Kesehatan DIY dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan pelaksana dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana/Fungsional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris: <ol style="list-style-type: none"> a. Kasubbag Umum 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Seksi Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan b. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit 4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Kesehatan Khusus b. Kepala Seksi Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi, dan Kesehatan Jiwa b. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat 6. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan b. Kepala Seksi, Farmasi, Makanan, Minuman, dan Alat Kesehatan 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis 8. Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus 9. Kelompok Jabatan Fungsional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan b. Pengelola Sistem dan Jaringan c. Bendahara d. Pengadministrasi Keuangan e. Pengelola Gaji f. Pengelola Akuntansi g. Verifikator Data Laporan Keuangan 2. Subbagian Umum: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadministrasi Umum b. Pengadministrasi Persuratan c. Pranata Kearsipan d. Pengadministrasi Kepegawaian e. Teknisi Sarana dan Prasarana f. Pengelola Barang Milik Negara g. Pengemudi 3. Seksi Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadministrasi Umum b. Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit c. Penata Penyehatan Lingkungan Pemukiman d. Analis Kesehatan 4. Seksi Pengendalian Penyakit: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung b. Pengelola Penyakit Tidak Menular c. Analis Kesehatan 5. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Kesehatan Khusus: <ol style="list-style-type: none"> a. Administrasi Umum b. Pengelola Rujukan Kesehatan c. Analis Kesehatan d. Di bawah Di bawah 6. Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Kesehatan Jiwa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelola Program Gizi b. Pengelola Program Kesehatan Keluarga c. Analis Kesehatan 7. Seksi Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Administrasi Umum b. Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat di bidang Kesehatan Masyarakat c. Penyuluh kesehatan dan pencegahan penyakit d. Analis Kesehatan 8. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> a. Administrasi Umum b. Analis Kompetensi dan Kualifikasi Ketenagaan c. Analis Kesehatan 9. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman, dan Alat Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> a. Analis Obat dan Makanan b. Pengelola Obat dan Alat-Alat Kesehatan

Gambar I. 4 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada BLKK

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 109, Dinas Kesehatan dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Dinas Kesehatan memiliki 3 (tiga) UPT, diantaranya Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi (BLKK), Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes), dan Balai Pelayanan Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkessos). Pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Dinas Kesehatan diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana/Fungsional
1. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi	1. Subbagian Tata usaha
2. Subbagian Tata usaha	a. Penyusun program kerja
3. Seksi Pelayanan	b. Pengelola Kearsipan
4. Kelompok Jabatan Fungsional	c. Pengelola Keuangan
	d. Pengelola pendapatan
	e. Pengelola kepegawaian
	f. Pelaksana kerumahtanggaan
	g. Pengelola Barang
	h. Pelaksana Kehumasan
	i. Pengelola Kepustakaan
	j. Pengelola Data dan Informasi
	k. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
	2. Seksi Pelayanan
	a. Pramu Laboratorium
	b. Teknisi Laboratorium

Gambar I. 5 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Bapeljamkessos

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 109, Dinas Kesehatan dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Dinas Kesehatan memiliki 3 (tiga) UPT, diantaranya Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi (BLKK), Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes), dan Balai Pelayanan Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkessos). Pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Dinas Kesehatan diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana/Fungsional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai Pelayanan Jaminan Kesehatan Sosial 2. Subbagian Tata usaha 3. Seksi Kepesertaan dan Pengembangan Jaminan 4. Seksi Pelayanan Jaminan Kesehatan 5. Kelompok Jabatan Fungsional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subbagian Tata usaha <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusun program anggaran dan pelaporan b. Pengelola Kearsipan c. Pengelola Keuangan d. Pengadministrasi Kepegawaian e. Pengelola kerumahtanggaan f. Pengelola Barang g. Pelaksana kehumasan h. Pengelola Kepustakaan i. Pengelola Data dan informasi 2. Seksi Kepesertaan dan Pengembangan Jaminan <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksana verifikasi kepesertaan b. Pelaksana pengembangan paket manfaat jaminan c. Pelaksana pelayanan informasi d. Pelaksana penanganan keluhan 3. Seksi Kepesertaan dan Pengembangan Jaminan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksana Verifikasi pelayanan dan pembiayaan jaminan kesehatan b. Pelaksana Verifikasi Medik Pelayanan Kesehatan 4. Seksi Pelayanan Jaminan Kesehatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi b. Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Gambar I. 6 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Bapelkes

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 109, Dinas Kesehatan dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Dinas Kesehatan memiliki 3 (tiga) UPT, diantaranya Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi (BLKK), Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes), dan Balai Pelayanan Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkessos). Pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Dinas Kesehatan diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana/Fungsional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan 2. Subbagian Tata usaha 3. Seksi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pelatihan 4. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan 5. Kelompok Jabatan Fungsional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subbagian Tata usaha <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusun program anggaran dan pelaporan b. Pengelola Kearsipan c. Pengelola Keuangan d. Pengadministrasi Kepegawaian e. Pengelola kerumahtanggaan f. Pengelola Barang g. Pelaksana kehumasan h. Pengelola Kepustakaan i. Pengelola Data dan informasi 2. Subbagian Tata usaha: 3. Seksi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pelatihan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pranata Diklat b. Pranata Jamuan c. Pengelola Asrama 4. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan

Gambar I. 7 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada RS Paru Respira

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 109, Pada Dinas Kesehatan terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yaitu Rumah Sakit Paru Respira dan Rumah Sakit Jiwa Grhasia. UOBK merupakan Unit Organisasi yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian di lingkungan Dinas. Hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan. Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Paru Respira pada Dinas Kesehatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana/Fungsional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur RS Paru Respira 2. Subbagian Program dan Keuangan 3. Subbag Umum 4. Seksi Pelayanan Medis 5. Seksi Pelayanan Keperawatan 6. Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan non Medis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subbagian Program dan Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan b. Analisis Sistem Informasi c. Bendahara d. Pengadministrasi Keuangan e. Pengelola Gaji f. Pengelola Akuntansi g. Verifikator Data Laporan Keuangan h. Pengelola Pendapatan 2. Subbagian Umum Jabatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadministrasi Umum b. Perancang Diklat c. Penyusun Bahan Bantuan Hukum d. Pengelola Pengaduan Publik e. Pengadministrasi Persuratan f. Pranata Kearsipan g. Analis SDM Aparatur h. Teknisi Sarana dan Prasarana i. Kustodian Barang Milik Negara j. Pengemudi Ambulan 3. Seksi Pelayanan Medis: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelola Pelayanan Kesehatan b. Pengelola Rujukan Kesehatan c. Analis Penjamin Mutu 4. Seksi Pelayanan Keperawatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Analis Kesehatan 5. Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis: <ol style="list-style-type: none"> a. Analis Pengembangan Sistem Operasi Medis b. Pengelola Obat dan Alat-Alat Kesehatan c. Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan d. Pengolah Makanan e. Binatu Rumah Sakit f. Juru Rawat Jenazah

Gambar I. 8 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada RS Jiwa Grhasia

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 109, Pada Dinas Kesehatan terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yaitu Rumah Sakit Paru Respira dan Rumah Sakit Jiwa Grhasia. UOBK merupakan Unit Organisasi yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian di lingkungan Dinas. Hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan. Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Grhasia pada Dinas Kesehatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana/Fungsional
1. Kepala RS Jiwa Grhasia 2. Sekretaris 1) Subbagian Program 2) Subbagian Keuangan 3) Subbagian Umum 3. Bidang Pelayanan Medik 1) Seksi Fasilitas Pelayanan Medik 2) Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Medik 4. Bidang Kepelayanan Keperawatan 1) Seksi Fasilitas Pelayanan Keperawatan 2) Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Keperawatan 5. Bidang Penunjang dan Sarana 1) Seksi Penunjang dan Sarana Medik 2) Seksi Penunjang dan Sarana Non Medik	1. Subbagian Program: a. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan b. Pengelola Sistem dan Jaringan 2. Subbagian Keuangan: a. Bendahara b. Pengadministrasi Keuangan c. Pengelola Gaji d. Pengelola Akuntansi e. Verifikator Data Laporan Keuangan f. Pengelola Pendapatan 3. Subbagian Umum : a. Pengadministrasi Umum b. Pranata Diklat c. Pengelola Bantuan Hukum d. Pengelola Pengaduan Publik e. Pengadministrasi Persuratan f. Pranata Kearsipan g. Pengadministrasi Kepegawaian h. Teknisi Sarana dan Prasarana i. Pengelola Barang Milik Negara j. Pengemudi Ambulan k. Pengemudi l. Pengaduan publik m. Pengadministrasi persuratan 4. Seksi Pelayanan Medik: a. Pengadministrasi Umum b. Pengelola Pelayanan Kesehatan c. Instruktur Vokasional 5. Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Keperawatan: a. Analis Penjamin Mutu 6. Seksi Pelayanan Keperawatan: a. Pengelola Keperawatan b. Pengadministrasi Umum 7. Seksi Pelayanan Penunjang Medik a. Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik b. Pengadministrasi Umum c. Pengelola Obat dan Alat-Alat Kesehatan 8. Seksi Penunjang dan Sarana Non Medik a. Pranata Diklat b. Pengolah Makanan c. Binatu Rumah Sakit d. Juru Rawat Jenazah

1.3. Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespons isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Dinas Kesehatan DIY adalah institusi pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan. Isu strategis banyak berkaitan dengan kesehatan, antara lain sebagai berikut:

1. *Stunting* dan Gizi Buruk

Angka *stunting* masih cukup tinggi. Permasalahan balita *stunting* di DIY masih memerlukan perhatian khusus bila ditinjau dari amanat RPJMN 2020-2024 dan RPJMD DIY 2022-2027 di mana prevalensi balita *stunting* ditargetkan sebesar 14% di tahun 2024. Selama kurun waktu 2020 penurunan *stunting* kurang bermakna, berdasarkan SKI 2023 prevalensi *stunting* DIY mencapai 18% (Indonesia pada 21,5%).(sumber SKI 2023)

Upaya untuk menekan angka *stunting* dan gizi buruk pada balita di DIY dengan mengoptimalkan pelayanan di posyandu, pemberian makanan pada ibu hamil, ibu hamil wajib mengonsumsi tablet tambah darah, inisiasi Menyusui Dini (IMD), pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI bagi anak usia 6-24 bulan, dan pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak.

Jumlah balita gizi kurang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2023 jumlah balita gizi kurang sebanyak 6.991 balita dan tahun 2024 meningkat tajam menjadi 8.806 balita atau naik sebanyak 1.815 kasus. (sumber Dataku Bapperida DIY, diakses tanggal 13 Maret 2025).

2. Kematian Ibu, dan kematian bayi

Kasus kematian Ibu masih terjadi dan terus diupayakan untuk ditekan, pada tahun 2024 terdapat 25 kasus kematian Ibu. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2023 sebanyak 22 kasus (sumber Dataku Bapperida DIY, diakses tanggal 13 Februari 2025). Penyebab tertinggi kematian ibu pada tahun 2024 adalah perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, serangan jantung dan penyakit tidak menular lainnya. Kasus kematian bayi pada tahun 2024 mengalami kenaikan, dari 272 kasus pada tahun 2023 naik menjadi 286 kasus atau mengalami kenaikan 14 kasus kematian bayi (sumber Dataset Dinas Kesehatan DIY).

3. Penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular (PTM) degeneratif

Penemuan Kasus baru HIV pada tahun 2024 yaitu sebanyak 886, mengalami penurunan sebesar 8,01% dibandingkan tahun 2023 dengan 957 kasus. Faktor penyebab utama adalah penularan melalui hubungan heteroseksual.

Target Eliminasi HIV Tahun 2030 akan tercapai dengan baik apabila semua target dapat mencapai 95% mulai dari penemuan kasus, pengobatan dan keberhasilan pengobatan yang ditunjukkan dengan tersupresifnya virus HIV.

Program penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di DIY menunjukkan tren peningkatan dalam menemukan kasus TBC, mengobati sampai sembuh dan memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada orang dengan infeksi laten TBC (ILTB). Tahun 2023 jumlah kasus yang ditemukan dan diobati sebanyak 5.988 kasus dari estimasi 9.301 kasus atau mencapai 64,4%. Tahun 2024 jumlah kasus yang ditemukan dan diobati sebanyak 5.273 kasus dari estimasi 6.270 kasus atau mencapai 84,1%. Dengan upaya yang semakin baik, diharapkan pada tahun 2030 akan tercapai Eliminasi TBC dengan indikator angka insidensi TBC hanya sebesar 65 per 100.000 penduduk.

Angka prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) DIY berada di atas rata-rata nasional. Prevalensi tumor/kanker di DIY tertinggi di Indonesia yaitu 9,6 per 1000 penduduk. Berdasarkan Dataku Bappeda DIY, pada tahun 2024 Penderita Diabetes Melitus (DM) di DIY sebesar 67.652, meningkat dibanding tahun 2023, di mana penderita DM sebanyak 58.242 orang (naik 13,91%). Sedangkan untuk penderita Hipertensi di tahun 2024 mencapai 131.221, turun 9,27% dibanding tahun 2023, di mana penderita hipertensi sebanyak 143.382 orang, dan terdapat 9.604 orang yang mengalami gangguan jiwa berat. (sumber Dataku Bapperida DIY, diakses tanggal 13 Februari 2025)

4. Bencana dan kejadian luar biasa (KLB)

Kondisi geografis, geologis, klimatologis DIY menempatkan DIY sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. DIY masih memiliki penyakit potensial KLB seperti malaria, demam dengue, leptospirosis, diare, kolera, difteri, antraks, rabies, campak, pertusis, maupun ancaman penyakit–penyakit *new emerging* dan *re-emerging*. Penyakit-penyakit tersebut apabila tidak dipantau dan dikendalikan maka akan mengancam kesehatan masyarakat Kementerian Kesehatan merilis bahwa terdapat tiga kasus konfirmasi penyakit *emerging* atau *re-emerging* yang dilaporkan di Indonesia yaitu *Monkeypox*,

Legionellosis, dan Polio. Untuk merespons bencana dan terjadinya KLB diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan, sarana prasarana, SDM kesehatan, dan sistem kesehatan yang responsif.

5. Mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan

DIY memiliki fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) berupa 79 rumah sakit, 121 Puskesmas, 135 klinik terakreditasi dan bekerja sama dengan BPJS, dan 137 klinik terakreditasi yang tidak bekerja sama dengan BPJS. Dengan standarisasi melalui akreditasi masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu. Ketersediaan tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit di DIY pada umumnya sudah baik, namun bila dilihat dari persebarannya masih belum merata antar kabupaten/kota di DIY terutama untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.

Tabel I. 1 Sebaran Tenaga Kesehatan di DIY

Jumlah Tenaga Medis			
Tahun 2024			
Kab/Kota	Dr Umum & Spesialis	Dr Gigi & Spesialis	Jumlah
Kab. Kulon Progo	242	73	315
Kab. bantul	683	197	880
Kab Gunung Kidul	274	57	331
Kab Sleman	1928	660	2588
Kota Yogyakarta	800	261	1061
DIY	3927	1248	5175

Sumber : Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Dinas Kesehatan DIY

6. Pelayanan kesehatan tradisional

Pemanfaatan kesehatan tradisional ini semakin luas dan meningkat di masyarakat. Pemanfaatan kesehatan tradisional sebesar 47,1% (SKI 2023). Pelayanan kesehatan tradisional sebagai amanah keistimewaan diharapkan mampu meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat, menjadi alternatif/pilihan dalam upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif, sekaligus sebagai upaya pelestarian nilai budaya adiluhung warisan leluhur yang didasarkan atas hasil inventarisasi, pengkajian, dan penelitian.

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I. 2 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi Dinas Kesehatan DIY

No	Jabatan	Formasi						Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi					Laki	Peremp.
1	2	3	4					5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA	SMP		S2	S1	DIV	D3	SMA	SMP	
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1					1	1						1
B.	Jabatan Administrasi														
	1. Administrator	5	5					5	5					1	4
	2. Pengawas	9		9				9	8	1				2	7
	3. Pelaksana	109		58	41	9	1	54	18	18	1	13	3	1	35
C.	Jabatan Fungsional														
	1. Ahli Pertama	26		26				8	2	6				1	7
	2. Ahli Muda	23		23				3	1	2				2	1
	3. Ahli Madya	16		16				2	1		1			0	2
	4. Terampil	3			3			0						0	0
	5. Mahir	2			2			0						0	0
	6. Penyelia	2			2			0						0	0
	Jumlah	196	6	132	48	9	1	82	36	27	2	13	3	1	57

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kesehatan DIY, Desember 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Kesehatan DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 36 orang (43,90%), disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 27 orang (32,93%), D3 13 orang (15,85%), SMA 3 orang (3,66%), DIV 2 orang (2,44%) dan SMP sebanyak 1 orang (1,22%). Komposisi pegawai perempuan lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 55 orang dari pejabat pelaksana dan akan berkurang kembali sebanyak 8 orang pada tahun 2025 karena memasuki BUP. Untuk pejabat fungsional, juga masih kekurangan personil. Ahli pertama kurang 18 orang, ahli muda kurang 20 orang, ahli madya kurang 14 orang, terampil kurang 3 orang, mahir kurang 2 orang dan penyelia kurang 2 orang.

Tabel I. 3 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi (BLKK)

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp.
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1/D	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi												
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	1	1										
	2. Pengawas	2	1	1			2	1	1			1	1
	3. Pelaksana	25		7	18		11		2	6	3	5	6
C.	Jabatan Fungsional	93	4	25	64		48	6	26	16		11	37
	Jumlah	121	6	33	82		61	7	29	22	3	17	44

Tabel I. 4 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp.
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi												
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	1	1				1	1				1	
	2. Pengawas	3	3				3	3					3
	3. Pelaksana	40		16	18	6	14	1	7	3	3	1	13
C.	Jabatan Fungsional	11	11				3	3					3
	Jumlah	55	15	16	18	6	21	8	7	3	3	2	19

Tabel I. 5 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi Balai Pelatihan Kesehatan (Bapel Jamkessos)

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp.
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi												
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	1	1				1	1				0	1
	2. Pengawas	3		3			3	2	1			1	2
	3. Pelaksana	31		10	21		8	1	4	3	0	1	7
C.	Jabatan Fungsional	0					0						
	Jumlah	35	1	13	21		12	4	5	3	0	2	10

Tabel I. 6 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi RS Paru Respira

No	Jabatan	Formasi						Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi					Laki	Peremp.
1	2	3	4					5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA	SMP		S2	S1	D3	SMA	SMP		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	-	-					-	-						-
B.	Jabatan Administrasi														
	1. Administrator	1		1				1	1						1
	2. Pengawas	5		5				5	3	2				2	3
	3. Pelaksana	79		26	38	13	2	29	0	12	8	7	2	13	16
C.	Jabatan Fungsional	253		131	122	0	0	135	16	56	63			47	88
	Jumlah	338	0	163	160	13	2	170	20	70	71	7	2	62	108

Tabel I. 7 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi RS Jiwa Grhasia

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp.
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	7	5	2			7	5	2			2	5
	2. Pengawas	12	7	5			12	7	5			4	8
	3. Pelaksana	108		43	37	28	30	3	11	6	10	17	13
C.	Jabatan Fungsional	471	51	176	244		219	25	98	96		62	157
	Jumlah	599	64	226	281	28	269	41	116	102	10	86	183

Berdasarkan data pada tabel I.1 sampai dengan tabel I.6, jumlah seluruh pegawai Dinas Kesehatan dan UPT sebanyak 614 orang. Tingkat pendidikan didominasi S1/DIV sebanyak 256 orang (41,63%), disusul jenjang D3 sebanyak 214 orang (34,80%), jenjang S2 sebanyak 116 orang (18,86%), jenjang SMA sebanyak 26 orang (4,23%), dan paling sedikit jenjang SMP dengan jumlah 3 orang (0,49%). Komposisi pegawai perempuan lebih mendominasi dengan jumlah 421 orang (68,46%) dibandingkan jumlah pegawai laki-laki sebesar 194 orang (31,54%).

Tabel I. 8 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap	3.690	30.065.562.915
1	Tanah	2 unit	474.357.000
2	Peralatan dan Mesin	2.154 unit	15.000.270.631
3	Gedung dan Bangunan	19 unit	14.392.247.660
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6 unit	151.411.654
	Aset Tetap Lainnya	1.509	47.275.970
1	Buku Perpustakaan	1.509 buku	47.275.970
2	Barang Bercorak Kesenian	0	0
	Aset Lainnya	75 unit	99.495.000
	Jumlah	3.765 unit	30.165.057.915

Sumber: Data Neraca Dinas Kesehatan 31 Desember 2024 (Unaudited)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2024

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 2 (dua) unit kendaraan dinas jabatan, 18 (delapan belas) unit kendaraan operasional, dan 24 (dua puluh empat) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia

meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, *filling cabinet*, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio *personal computer* (PC) / laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I. 9 Sarana-Prasarana BLKK

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap	2.144	117.557.419.615
1	Tanah	2 unit	47.419.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	2.121 unit	47.152.224.225,68
3	Gedung dan Bangunan	9 unit	20.276.508.304,78
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12 unit	2.709.687.084,34
	Aset Tetap Lainnya	202	318.918.095
1	Bahan Perpustakaan	200	27.228.550,00
2	Aset Tidak Berwujud	2	291.689.545,00
	Aset	2.346	117.876.337.709,80
	Jumlah	2346 unit	117.876.337.709,80

Sumber: Data Neraca BLKK 31 Desember 2024 (Unaudited)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2024

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 3 (tiga) unit kendaraan operasional, dan 3 (tiga) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, *filling cabinet*, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio *personal computer* (PC) / laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I. 10 Sarana-Prasarana Bapel Jamkessos

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap	628	9.227.009.209
1	Tanah	1	3.166.758.000
2	Peralatan dan Mesin	560	2.271.304.975
3	Gedung dan Bangunan	15	3.195.425.696
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	3	588.102.883
	Aset Tetap Lainnya	49	5.417.655
1	Buku Perpustakaan	49 buku	5.417.655
2	Barang Bercorak Kesenian	0	0
	Aset Lainnya	22 unit	253.930.000
	Aset tidak Berwujud(ATB)	1 unit	92.500.000
	Aset Lain-lain	21 unit	161.430.000
	Jumlah	650 unit	9.480.939.209

Sumber: Data Neraca Bapel Jamkessos 31 Desember 2024 (Unaudited)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2024

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 3 (tiga) unit roda dua, 1 (satu) unit kendaraan dinas roda empat dan 2 (dua) unit kendaraan operasional roda empat. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, *filling cabinet*, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio *personal computer* (PC) / laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I. 11 Sarana-Prasarana Bapelkes

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap	4.223	31.361.026.038
1	Tanah	2 unit	1.693.625.000
2	Peralatan dan Mesin	1.263 unit	9.993.592.363
3	Gedung dan Bangunan	11 unit	13.794.428.051
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8 unit	499.024.102
	Aset Tetap Lainnya	1.129	78.248.921
1	Buku Perpustakaan	1.128 buku	76.752.121
2	Barang Bercorak Kesenian	1 buah	1.496.800
	Aset Lainnya	67 unit	297.083.777
	Jumlah	2.480 unit	26.356.002.214

Sumber: Data Neraca Bapelkes 31 Desember 2024 (Unaudited)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2024

Kendaraan dinas terdiri dari yakni, 7 (tujuh) unit kendaraan operasional, 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Khusus (Mobil Ambulans) dan 2 (dua) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, *filling cabinet*, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio *personal computer* (PC) / laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I. 12 Sarana-Prasarana RS Paru Respira

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap		
1	Tanah	219 bidang	79.109.617.850,00
2	Peralatan dan Mesin	3.448 unit	51.283.410.309,30
3	Gedung dan Bangunan	9 unit	34.759.020.959,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3 unit	150.166.400,00
	Aset Tetap Lainnya		
1	Buku Perpustakaan	348 buah	62.911.850,00
2	Barang Bercorak Kesenian	0	
	Aset Lainnya	133 unit	846.875.275,00
	Jumlah	4161 bidang/unit/buah	166.212.002.643,30

Sumber: Data Neraca RS Paru Respira 31 Desember 2024 (Unaudited)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2024

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 1 (satu) unit kendaraan operasional, 1 (satu) unit mobil jenazah, 2 (dua) unit mobil ambulans dan 7 (unit) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Ruangan untuk pelayanan terdiri dari: ruang UGD, ruang rawat inap, ruang rawat jalan, ruang radiologi, ruang laboratorium, ruang *laundry*, dan ruang gizi. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, *filling cabinet*, pendingin ruangan,

alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio *personal computer* (PC) / laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I. 13 Sarana-Prasarana RS Jiwa Grhasia

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap	7.846	122.634.131.311,76
1	Tanah	1	150.000,00
2	Peralatan dan Mesin	7303	50.678.567.583,00
3	Gedung dan Bangunan	65	65.348.475.451,76
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	18	3.464.336.077,00
5	Aset Tetap Lainnya	450	180.497.200,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9	2.962.105.000,00
	Aset Lainnya	268	9.296.776.180,00
1	Aset Tidak Berwujud	3	1.367.088.500,00
2	Aset Lain-lain	265	7.929.687.680,00
Jumlah		8.114	131.930.907.491,76

Sumber: Data Neraca RS Jiwa Grhasia 31 Desember 2024 (Unaudited)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2024

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 5 (lima) unit kendaraan operasional, 1 (satu) unit mobil jenazah, 3 (tiga) unit ambulans, 1 (satu) unit bus dan 2 (unit) kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang aula, ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, masjid, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Ruangan untuk pelayanan terdiri dari: ruang UGD, ruang rawat inap, ruang rawat jalan, ruang radiologi, ruang laboratorium, ruang *laundry*, dan ruang gizi. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, *filling cabinet*, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio *personal computer* (PC) / laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I. 14 Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	42.212.766.500	45.982.956.220	3.770.189.720
	1	02	Retribusi Daerah	37.590.566.500	39.241.600.000	1.651.033.500
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	4.622.200.000	6.741.356.220	2.119.156.220
			Jumlah Pendapatan	42.212.766.500	45.982.956.220	3.770.189.720
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	219.650.397.474	247.004.961.680	27.354.564.206
5	1	01	Belanja Pegawai	118.745.042.544	116.288.358.074	(2.456.684.470)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.705.354.930	130.516.603.606	29.811.248.676
5	1	05	Belanja Hibah	200.000.000	200.000.000	Rp. 0
5	2		BELANJA MODAL	50.235.804.500	57.496.290.612	7.260.486.112
5	2	01	Belanja Modal Tanah	26.248.000.000	25.218.000.000	(1.030.000.000)
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.875.155.500	19.610.115.064	9.734.959.564
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.037.649.000	12.233.067.548	(1.804.581.452)
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 0	360.108.000	360.108.000
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000	75.000.000	Rp. 0
			Jumlah Belanja	269.886.201.974	304.501.252.292	34.615.050.318
			Total Surplus/(Defisit)	(227.673.435.474)	(258.518.296.072)	(30.844.860.598)
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
			Pembiayaan Neto	0	0	0

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2024

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.13, untuk tahun 2024 Anggaran Dinas Kesehatan DIY semula Rp269.886.201.974 dan mengalami perubahan menjadi Rp 304.501.252.292 atau bertambah Rp 34.615.050.318. Perubahan anggaran Tahun 2024 sebagai penghargaan Pemerintah pusat kepada Pemda DIY melalui Dana Insentif Daerah (DID) untuk penanganan *stunting* dan karena adanya perubahan perencanaan aktivitas.

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tabel I. 15 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Meningkatkan pengendalian internal dalam rangka pencapaian kinerja tidak hanya pada level <i>output</i> yang sudah tercapai, namun diharapkan juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada <i>outcome</i> yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian khususnya pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program peningkatan Kapasitas SDM, Program sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan diharapkan dapat membantu mewujudkan tercapainya sasaran Pemerintah Daerah DIY yaitu Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat.	Mengoptimalkan pengendalian dengan meningkatkan pemahaman serta kepedulian segenap pegawai Dinas Kesehatan DIY untuk bersama-sama berupaya meningkatkan hasil pengukuran kinerja melalui berbagai langkah internalisasi sehingga dapat membantu mewujudkan tercapainya sasaran Pemerintah Daerah DIY
2.	Menyosialisasikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah kepada seluruh pegawai Diskes DIY dan UPT-nya agar mengetahui dan memahami kriteria yang harus dipenuhi untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Melakukan sosialisasi secara intens kepada seluruh pegawai Dinas Kesehatan DIY dan UPT mengenai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah guna meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3.	Meningkatkan koordinasi internal dan koordinasi lintas sektor sehingga capaian sasaran/kinerja organisasi dan konsistensi data capaian sasaran/kinerja organisasi dapat menjadi lebih baik.	Melakukan koordinasi dan evaluasi internal maupun lintas sektor lebih intens dalam mencapai sasaran organisasi

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II berisi:

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Tahun 2024 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 -2027 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 diwarnai agenda perubahan baik melalui mekanisme perubahan dana keistimewaan maupun perubahan APBD. Hal ini ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pada dasarnya perubahan anggaran tidak mengubah target kinerja pada level tujuan Perangkat Daerah, sasaran strategis Perangkat Daerah dan program Perangkat daerah, namun mengubah pada tataran target kinerja *output* dalam sub kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Kesehatan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027.

Renstra Dinas Kesehatan DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD DIY Tahun 2022-2027 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu tahun 2024. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Kesehatan DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah “Kualitas SDM Yogyakarta yang Dapat Diandalkan” dan “Meningkatnya *Good Governance*”. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan DIY selama lima tahun adalah:

“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan DIY dalam waktu lima tahun dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel II. 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kesehatan DIY, 2022-2027

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATU-AN	Kondisi Awal (Baseline 2022)	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tujuan : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Pada Balita	%		11,9	11,7	11,5	11,3	11,2	11,2
2.	Sasaran 1 : Terwujudnya keluarga sehat	Indeks Keluarga Sehat	Indeks		0,33	0,36	0,39	0,42	0,45	0,45
3.	Sasaran 2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	A (84,26)	A (92,50)	A (92,75)	A (92,8)	A (92,9)	A (93)	A (93)

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya keluarga sehat 2. Meningkatnya Tata kelola penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bencana dan KLB dengan penekanan <i>pre- hospital emergency</i> dan penguatan SPGDT serta dukungan pencapaian SPM kabupaten/kota bidang kesehatan 2. Fokus pada pencapaian transformasi Sistem Kesehatan dengan peningkatan kualitas SDM, penguatan pembiayaan jaminan kesehatan, penguatan layanan kesehatan primer, penguatan layanan rujukan, dan pengembangan RS Paru Respira menjadi RS Unggulan Paru di DIY dan Jateng wilayah selatan 3. Fokus pada intervensi penurunan <i>Stunting</i> 4. Fokus pada <i>bridging system/integrasi</i> sistem informasi dan pemanfaatan teknologi informasi kesehatan 5. Fokus mendukung budaya dan kesesuaian tata ruang dengan upaya pengembangan kesehatan tradisional serta mengembangkan RS Jiwa Grhasia menjadi RS penyangga layanan kesehatan di kawasan rawan bencana Merapi 6. Fokus pada pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi upaya perencanaan, pencapaian, dan pengendalian SPM Bidang Kesehatan tingkat provinsi serta optimalisasi dukungan pencapaian SPM kabupaten kota dengan meningkatkan kemitraan lintas sektor 2. Optimalisasi mutu layanan dan pengembangan sarana prasarana pelayanan kesehatan untuk mengurangi disparitas layanan di wilayah Selatan 3. Optimalisasi konvergensi program untuk pencapaian penurunan <i>stunting</i> dengan pencapaian Indeks Keluarga Sehat dan Penguatan GERMAS 4. Optimalisasi implementasi dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) terintegrasi dan <i>real time</i> 5. Optimalisasi pengembangan kesehatan tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan dan komunitas serta optimalisasi pengembangan dan pembangunan RS Grhasia menjadi RS penyangga layanan kesehatan di kawasan rawan bencana Merapi 6. Optimalisasi pengarusutamaan gender pada pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesehatan

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan 2022-2027

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan DIY tahun 2024 dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Terwujudnya keluarga sehat	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	91.662.315.726	85.225.888.113	(6.436.427.613)
		1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	32.023.153.200	32.023.153.200	(1.033.562.000)
		1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	3.014.500.000	3.014.500.000	0
		1.02.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	8.000.000	8.000.000	0
		1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	350.000	350.000	0

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	167.004.100	167.004.100	0
		1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	26.248.150.000	25.218.150.000	(1.030.000.000)
		1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.585.149.100	2.581.587.100	(3.562.000)
		1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	59.585.479.526	54.182.613.913	(5.402.865.613)
		1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	693.304.700	693.304.700	0
		1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	234.235.000	308.635.000	74.400.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	980.515.350	959.635.350	(20.880.000)
		1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	5.000.000	5.000.000	0
		1.02.02.1.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	5.000.000	5.000.000	0
		1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	238.928.500	491.755.699	252.827.199
		1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.000.000	5.000.000	0
		1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.000.000	1.004.500.000	999.500.000
		1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.304.461.500	1.517.386.500	212.925.000
		1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.396.556.850	1.327.510.000	(69.046.850)
		1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.000.000	5.000.000	0

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	54.310.352.576	47.461.703.614	(6.848.648.962)
		1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	84.786.000	84.786.000	0
		1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	5.000.000	5.000.000	0
		1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Grhasia)	1.000.000	1.000.000	0
		1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	264.799.950	264.799.950	0
		1.02.02.1.02.0030 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	46.539.100	42.597.100	(3.942.000)
		1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	6.300.000	6.300.000	0
		1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6.300.000	6.300.000	0
		1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	47.383.000	47.383.000	0

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.000.000	5.000.000	0
		1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	42.383.000	42.383.000	0
		1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	507.357.600	507.357.600	0
		1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	28.982.400	28.982.400	0
		1.02.03.1.01.001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	23.982.400	23.982.400	0
		1.02.03.1.01.002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.000.000	5.000.000	0
		1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	478.375.200	478.375.200	0

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	170.517.950	170.517.950	0
		1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	307.857.250	307.857.250	0
		1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	24.308.800	24.308.800	0
		1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	19.308.800	19.308.800	0
		1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	19.308.800	19.308.800	0
		1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	5.000.000	5.000.000	0

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	5.000.000	5.000.000	0
		1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	57.430.000	57.430.000	0
		1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	57.430.000	57.430.000	0
		1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	57.430.000	57.430.000	0
		2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	395.000.000	395.000.000	0
		2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	395.000.000	395.000.000	0
		2.22.08.5.08.0004 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	395.000.000	395.000.000	0

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	19.336.694.000	25.881.853.912	6.545.159.912
		1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	13.352.649.000	11.344.627.132	(2.008.021.868)
		1.03.13.5.02.0008 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	13.352.649.000	11.344.627.132	(2.008.021.868)
		1.03.13.5.04 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang			
		Total Nilai Anggaran yang Mendukung Sasaran 1	111.983.106.126	112.091.838.425	108.732.299
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	157.903.095.848	192.409.413.867	34.506.318.019
		1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.637.600	23.637.600	(18.000.000)
		1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.637.600	20.637.600	(18.000.000)

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1.500.000	1.500.000	0
		1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.000	0
		1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	104.029.131.196	101.449.171.226	(2.579.959.970)
		1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	104.029.131.196	101.449.171.226	(2.579.959.970)
		1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	221.840.400	196.100.400	(25.740.000)
		1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.500.000	0
		1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	1.500.000	1.500.000	0
		1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	69.360.100	69.360.100	0
		1.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	2.000.000	0

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	67.360.100	67.360.100	0
		1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	232.310.150	256.105.150	23.795.000
		1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.096.600	8.096.600	0
		1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.258.200	71.258.200	0
		1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.732.800	23.732.800	0
		1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000	0	(75.000)
		1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.292.550	33.812.550	(480.000)
		1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.705.000	119.055.000	24.350.000
		1.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000	150.000	0

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.592.000	9.592.000	0
		1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.600.000	4.600.000	0
		1.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.992.000	4.992.000	0
		1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.536.955.942	5.503.105.842	-33.850.100
		1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.560.000	1.560.000	0
		1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.825.079.200	1.791.229.100	-33.850.100
		1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.710.316.742	3.710.316.742	0
		1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	675.542.360	656.505.360	-19.037.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.108.000	92.858.000	-7.250.000
		1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.486.360	388.699.360	-11.787.000
		1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.870.000	54.870.000	0
		1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.968.000	85.968.000	0
		1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Bapeljamkessos, Bapelkes)	34.110.000	34.110.000	0
		1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD (BLKK, Bapelkes, RSJ Grhasia, RSP Respira)	47.308.566.500	84.441.936.589	37.133.370.089

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	47.308.566.500	84.441.936.589	37.133.370.089
		Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 2	157.903.095.848	192.409.413.867	34.506.318.019
Total Anggaran yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024			269.886.201.974	304.501.252.292	34.615.050.318

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan DIY Tahun 2024

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Tujuan Dinas Kesehatan DIY Tahun 2024

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Pada Balita	%	11,7	Triwulan I	12,00
					Triwulan II	11,99
					Triwulan III	11,8
					Triwulan IV	11,7

Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan DIY Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terwujudnya keluarga sehat	Indeks Keluarga Sehat	%	0,36	Triwulan I	0,345
					Triwulan II	0,35
					Triwulan III	0,355
					Triwulan IV	0,36
2.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (APBD)	Rp 7.304.226.550
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (APBD)	Rp 341.839.400
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman (APBD)	Rp 24.308.800
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (APBD)	Rp 57.430.000
5.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dais)	Rp 395.000.000
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 34.240.616.115
Jumlah Anggaran		Rp 42.363.420.865

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

Pada tahun 2024, Dinas Kesehatan DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Reviu dilakukan karena adanya perubahan anggaran kegiatan dan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tujuan Kepala Dinas Kesehatan DIY Tahun 2024

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Pada Balita	%	11,7	Triwulan I	12,0
					Triwulan II	11,9
					Triwulan III	11,8
					Triwulan IV	11,7

Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Sasaran Kepala Dinas Kesehatan DIY Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terwujudnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,360	Triwulan I	0,345
					Triwulan II	0,350
					Triwulan III	0,355
					Triwulan IV	0,360
2.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	indeks	A (92,75)	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A (92,75)*

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

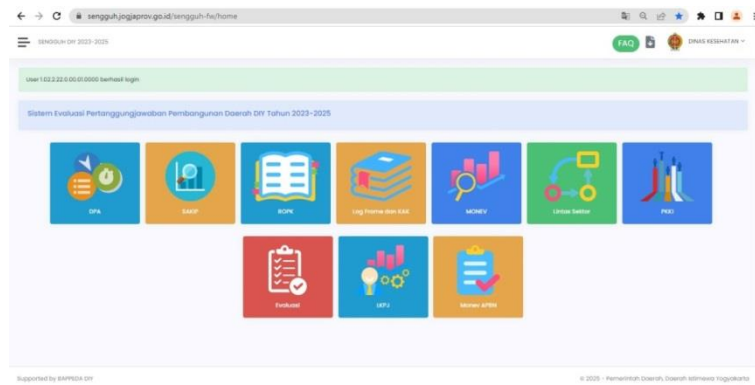
No	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (APBD, DAK NF, DID, DBH CHT, Pajak Rokok)	Rp 8.750.389.899
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (APBD, DAK NF, Pajak Rokok)	Rp 341.839.400
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman (APBD, Pajak Rokok)	Rp 24.308.800
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Pajak Rokok)	Rp 57.430.000
5.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dais)	Rp 395.000.000
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 32.360.149.241
	Jumlah Anggaran	Rp 41.929.117.340

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprovo.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

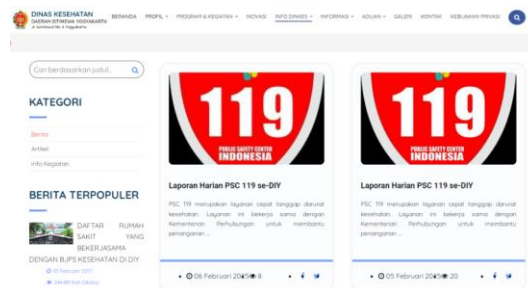
Gambar II. 1 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber: <http://sengguh.jogjaprov.go.id/>

2. Laman dan *Instagram* Dinas Kesehatan DIY adalah instrumen yang mendukung upaya keterbukaan publik melalui berbagai informasi dan laporan yang disajikan kepada masyarakat.

Gambar II. 2 Website Dinas Kesehatan DIY



Sumber : <https://dinkes.jogjaprov.go.id/>

Gambar II. 3 Instagram Dinas Kesehatan DIY

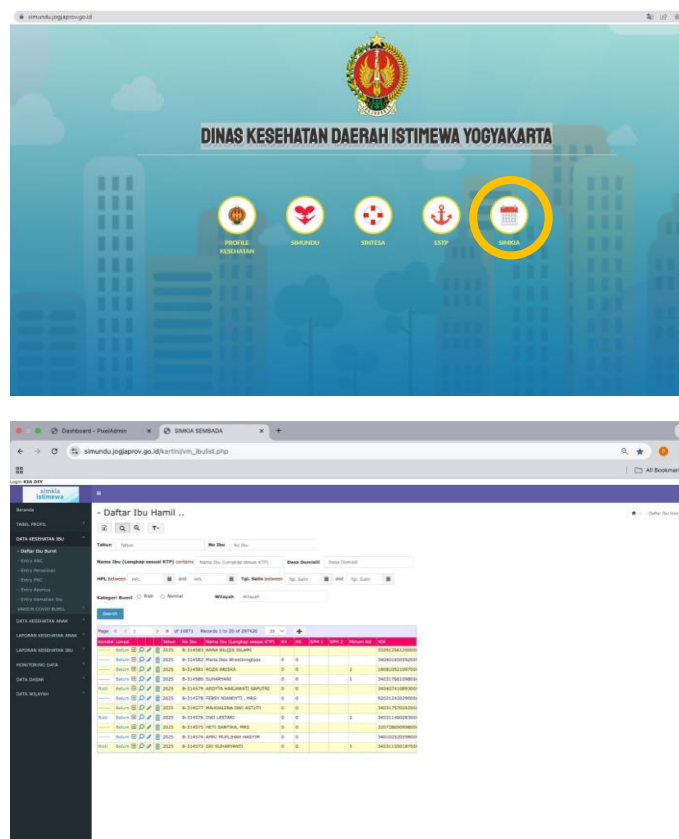


Sumber : https://www.instagram.com/dinas_kesehatan_diy

3. SIMKIA (Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak) ISTIMEWA adalah aplikasi berbasis *website* yang dikembangkan Dinas Kesehatan DIY untuk memudahkan pengelolaan data. Aplikasi ini menggantikan metode kohort manual versi lama, tidak membutuhkan kertas cetak kohort, sehingga mengurangi biaya. Data pemeriksaan kesehatan ibu hamil hingga balita di

entri oleh fasilitas pemberi layanan, diantaranya puskesmas, praktik mandiri bidan (PMB), dan rumah sakit, selanjutnya data tersebut dapat diakses oleh wilayah pengampu sasaran (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi). Melalui aplikasi ini data seluruh ibu hamil, nifas, bayi, dan balita di DIY dapat terekam dengan baik *by name by address* sehingga dapat memberikan manfaat bagi upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak di DIY.

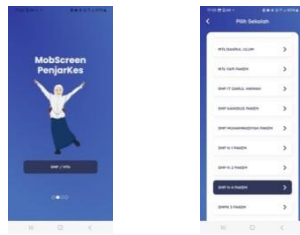
Gambar II. 4 SIMKIA



Sumber : <https://simundu.jogjaprov.go.id/kartini/login.php>

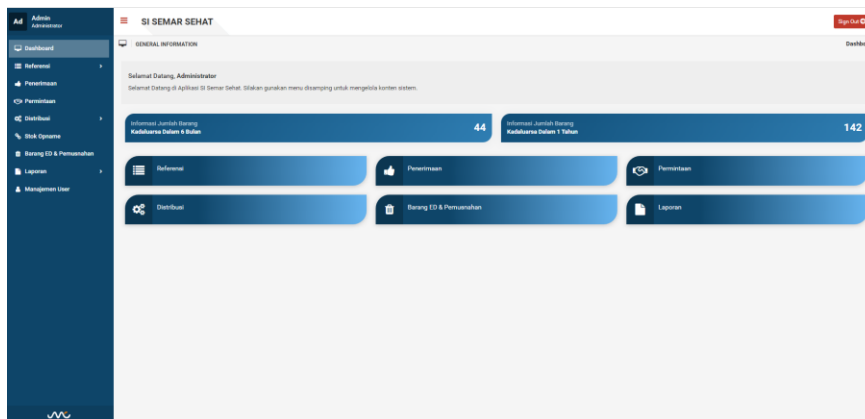
4. Aplikasi *MobScreen* PenjarKes adalah aplikasi penjangkaran kesehatan untuk peserta didik di DIY mulai dari tingkat SD hingga SMA termasuk SLB dan pendidikan non formal. Melalui aplikasi *MobScreen* PenjarKes, pendataan kesehatan peserta didik dapat dilakukan lebih mudah sekaligus mempermudah petugas puskesmas dalam melakukan penilaian rekapitulasi dan pencatatan laporan. Aplikasi *MobScreen* PenjarKes ini merupakan kerja sama Dinas Kesehatan DIY bersama Dinas Kominfo DIY dan Bank BPD DIY.

Gambar II. 5 MobScreen Penjarkes



5. SI SEMAR SEHAT (Sistem Informasi Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan) adalah aplikasi berbasis *website* untuk memudahkan pekerjaan dalam pendistribusian obat, alat kesehatan dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan DIY.

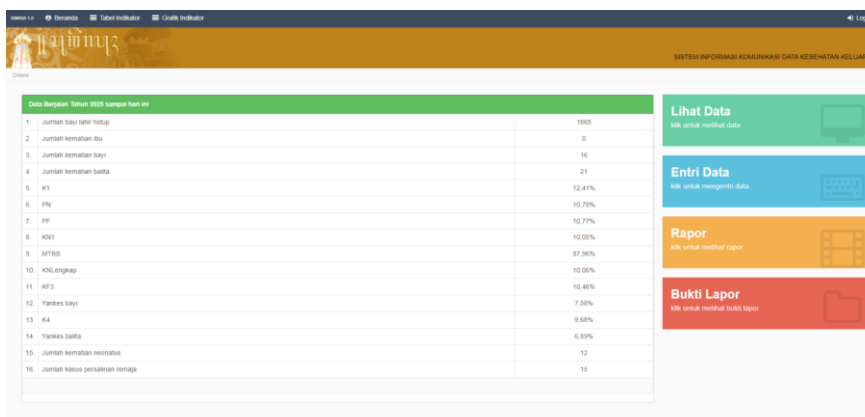
Gambar II. 6 SI Semar Sehat



Sumber : <https://semarsehat.jogjaprovo.go.id>

6. Dinas Kesehatan DIY memiliki aplikasi <https://kesgadiy.web.id/> yang digunakan dalam pelaporan capaian pelayanan kesehatan keluarga. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis *website* yang dapat diakses oleh publik. Data hasil capaian yang tercantum pada aplikasi, data diinput oleh Puskesmas maupun Dinas Kesehatan.

Gambar II. 7 Website Kesga



Sumber : <https://kesgadiy.web.id/>

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab III berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2024
2. Capaian Kinerja Lainnya
3. Efisiensi Anggaran
4. Inovasi
5. Lintas Sektor

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Kesehatan DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Kesehatan DIY dengan Gubernur DIY tahun 2024.

Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ **Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	REALI SASI 2023	TAHUN 2024				TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTR A
						TARG ET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITER IA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tujuan : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<u>Indikator:</u> Prevalensi Berat Badan Kurang)Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Pada Balita <u>Meta Indikator:</u> Jumlah anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) memiliki Z-score kurang dari - 2 SD dibagi jumlah seluruh anak umur 0	%	12,1	10,57	11,7	10,76 (Sumber data : sigiziter padu.ke mkes.g o.id Data ditarik di Bulan Juli 2024)	108,03 (2x target sebesar 11,7 dikurangi realisasi sebesar 10,76 dibagi target sebesar 11,7 dikali 100%)) <i>Indikator invers</i>	Sangat Baik	11,2

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	REALI SASI 2023	TAHUN 2024				TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTR A
						TARG ET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITER IA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		sampai 59 bulan yang ditimbang di wilayah DIY pada kurun waktu/satuan waktu tertentu dikali 100%								
2.	Sasaran 1 : Terwujudnya keluarga sehat	<u>Indikator:</u> Indeks Keluarga Sehat <u>Meta Indikator:</u> Indikator ini diukur dari 12 indikator utama sebagai perhitungan IKS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.	Indeks	0,31	0,35	0,36	0,396 (jumlah keluarga di DIY yang memiliki IKS lebih dari 0,8 sebanyak 386.474 keluarga dibagi Jumlah Keluarga di DIY sebanyak 976.847 keluarga)	110 (realisasi sebesar 0,396 dibagi target sebesar 0,36 dikali 100%)	Sangat Baik	0,45
3.	Sasaran 2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	<u>Indikator:</u> Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah <u>Meta Indikator:</u> Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	kategori	A	A (92,72)	A (92,75)	A (97,47) (Penilaian atas RB Tematik dan RB General oleh Biro Organisasi)	105,09% (Persentase realisasi terhadap target dibagi capaian dikalikan 100%))	Sangat Baik	93

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Tujuan Perangkat Daerah

Kinerja tujuan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Tujuan	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Pada Balita	Jumlah anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD dibagi jumlah seluruh anak umur 0 sampai 59 bulan yang ditimbang di wilayah DIY pada kurun waktu /satuan waktu tertentu dikali 100%

Kinerja Tujuan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2024

No	Indikator Tujuan	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Indikator :</u> Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Pada Balita <u>Meta Indikator :</u> Jumlah anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat	10,57	11,7	10,76 (Sumber data : sigiziterpadu.kemkes.go.id Data ditarik di Bulan Juli 2024)	108,03 (2x target sebesar 11,7 dikurangi realisasi sebesar 10,76 dibagi target sebesar 11,7 dikali 100%) <i>Indikator invers</i>	11,2	103,93% (2x target akhir renstra sebesar 11,2 dikurangi realisasi tahun 2024 sebesar 10,76 dibagi target sebesar 11,2 dikali 100%) <i>Indikator invers</i>

Badan menurut Umur (BB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD dibagi jumlah seluruh anak umur 0 sampai 59 bulan yang ditimbang di wilayah DIY pada kurun waktu /satuan waktu tertentu dikali 100%							
--	--	--	--	--	--	--	--

**** Data yang digunakan adalah data bulan Juni 2024, dimana pada Bulan Juni 2024 dilaksanakan kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting berdasarkan Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 400.5.3/3161/Bangda perihal Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Daerah dan Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 8/SE/V/2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga data yang dilaporkan adalah data Bulan Juni 2024, yang ditarik pada Bulan Juli 2024.**

Analisis Ketercapaian Tujuan: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut:

- Tercapai 10,76%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 108,03% (terlampau).
- Dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 10,57%, terjadi kenaikan 0,19% (indikator *inverse*).
- Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target akhir renstra tahun 2027 sebesar 103,93%, di mana target akhir renstra untuk Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Pada Balita sebesar 11,2.

Faktor Pendukung keberhasilan

- Adanya SE Kemendagri untuk melakukan intervensi serentak pencegahan *stunting* pada Bulan Juni 2024, angka partisipasi masyarakat dalam penimbangan meningkat dari 80,29% pada tahun 2023 menjadi 99,84%.
- Tersedianya anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita di tingkat kabupaten/kota maupun Pemda DIY.

- c. Tersedianya anggaran penemuan kasus TB (ACF TB) bagi balita yang tidak naik berat badan setelah diberikan makanan tambahan.
- d. Terjalannya kerja sama lintas sektor melalui upaya pemberdayaan masyarakat, sebesar 99,8% posyandu di DIY masuk dalam kategori posyandu aktif
- e. Kader di DIY yang menguasai 25 kompetensi mencapai 21%.
- f. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Anak Terintegrasi (PKAT) di 58 Puskesmas, sehingga permasalahan kesehatan balita mampu dideteksi sejak usia 6 bulan serta adanya dukungan dari organisasi profesi (IDAI) dalam pelaksanaan PKAT

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Persentase balita yang tidak naik berat badan dibandingkan balita yang ditimbang sebesar 50,15%. Hal ini merupakan faktor risiko terjadinya *underweight* pada balita.
- b. Praktik pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) belum sebaik pengetahuan ibu. Berdasar hasil survey Pemberian Makan bagi Bayi dan Anak (PMBA) di DIY tahun 2022, pengetahuan ibu mencapai >75 (baik), sedangkan praktik pemberian makan kepada balita rata-rata 60 (kurang)
- c. Masih tingginya kasus diare dan pneumonia, yang menjadi faktor risiko gangguan pertumbuhan pada balita.

Capaian indikator tujuan tersebut didukung oleh kinerja 2 (dua) Sasaran Strategis, yakni Terwujudnya Keluarga Sehat dan Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah.

3.1.2. Sasaran 1: Terwujudnya Keluarga Sehat

Kinerja sasaran Terwujudnya Keluarga Sehat diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III. 5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya keluarga sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indikator ini diukur dari 12 indikator utama sebagai perhitungan IKS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
			<p>Capaian indikator sasaran dihitung dari jumlah keluarga di DIY yang memiliki IKS lebih dari 0,8 dibagi dengan jumlah keluarga di DIY</p> <p>Rumus IKS =</p> $\frac{\sum \text{Keluarga dengan IKS} > 0,8}{\sum \text{Keluarga}}$ <p>Nilai IKS merupakan akumulasi dari nilai 12 indikator utama sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga mengikuti program KB 2. Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan 3. Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap 4. Bayi mendapatkan ASI Eksklusif 5. Pertumbuhan Balita dipantau 6. Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar 7. Penderita hipertensi yang berobat teratur 8. Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan 9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok 10. Keluarga sudah menjadi anggota JKN 11. Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih 12. Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga

Indeks Keluarga Sehat (IKS) tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 6 Rekapitulasi Indeks Keluarga Sehat Provinsi Tahun 2024

No	Indikator	Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Kota Yogyakarta	%Cakupan Provinsi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Keluarga Mengikuti program KB*)	56,01%	62,03%	68.41%	44,58%	51,97%	59,03%
	Σ Keluarga Bernilai Y	20.219	49.128	66.297	27.314	11.166	174.124
	Σ Keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"	36.101	79.203	96.908	61.271	21.484	294.967
2	Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan	98,17%	98,45%	97.85%	98,23%	96,66%	98,11%

No	Indikator	Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Kota Yogyakarta	%Cakupan Provinsi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Σ Keluarga Bernilai Y	4.515	7.696	4.968	8.390	1.768	27.337
	Σ Keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"	4.599	7.817	5.077	8.541	1.829	27.863
3	Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap *)	98,99%	98,46%	96,31%	98,52%	98,05%	98,30%
	Σ Keluarga Bernilai Y	3.714	9.346	2.841	10.281	2.064	28.246
	Σ Keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"	3.752	9.492	2.950	10.435	2.105	28.734
4	Bayi mendapatkan ASI Eksklusif	94,24%	93,13%	62,16%	90,16%	90,24%	89,25%
	Σ Keluarga Bernilai Y	4.863	12.236	2.129	13.034	2.653	34.915
	Σ Keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"	5.160	13.139	3.425	14.457	2.940	39.121
5	Pertumbuhan Balita dipantau	97,11%	95,67%	96,04%	94,39%	94,55%	95,39%
	Σ Keluarga Bernilai Y	18.386	42.785	17.106	45.555	9.862	133.694
	Σ Keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"	18.934	44.722	17.812	48.264	10.430	140.162
6	Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar	57,10%	41,07%	27,39%	39,42%	49,81%	39,62%
	Σ Keluarga Bernilai Y	820	1.582	1.098	1.836	942	6.278
	Σ Keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"	1.436	3.852	4.009	4.657	1.891	15.845
7	Penderita hipertensi yang berobat teratur	20,27%	28,90%	14,27%	35,18%	33,81%	31,36%
	Σ Keluarga Bernilai Y	10.269	24.649	7.286	34.247	10.175	86.626
	Σ Keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"	50.663	85.283	51.058	97.352	30.099	276.255
8	Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan	57,89%	37,86%	38,30%	23,90%	48,32%	36,71%
	Σ Keluarga Bernilai Y	807	1.193	710	833	359	3.902
	Σ Keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"	1.394	3.151	1.854	3.486	743	10.628
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok *)	57,40%	58,29%	50,43%	59,57%	64,66%	57,53%
	Σ Keluarga Bernilai Y	80.510	160.454	94.929	175.313	49.553	560.759
	Σ Keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"	140.261	275.250	188.242	294.280	76.638	974.671
10	Keluarga sudah menjadi anggota JKN	79,78%	79,71%	79,16%	78,47%	92,55%	80,25%
	Σ Keluarga Bernilai Y	111.859	219.417	148.966	230.753	70.933	781.928
	Σ Keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"	140.212	275.257	188.182	294.083	76.639	974.373
11	Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih	92,96%	94,93%	96,91%	95,26%	97,20%	95,31%
	Σ Keluarga Bernilai Y	128.636	261.348	179.281	280.361	74.477	924.103
	Σ Keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"	138.373	275.311	184.991	294.317	76.619	969.611
12	Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga	96,27%	97,89%	95,52%	96,93%	98,42%	96,96%
	Σ Keluarga Bernilai Y	133.180	269.495	175.772	285.256	75.392	939.095
	Σ Keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"	138.343	275.307	184.024	294.288	76.600	968.562
Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0,33	0,365	0,521	0,362	0,447	0,396
Σ Keluarga dengan IKS > 0,800		46.239	100.475	99.076	106.416	34.268	386.474
Σ Keluarga		140.276	275.319	190.274	294.339	76.639	976.847

Keterangan:

Σ Keluarga Bernilai Y: Adalah suatu kondisi/keadaan anggota keluarga atau keluarga SESUAI dengan indikator
 Σ Keluarga bernilai "N" : Adalah suatu kondisi/keadaan di mana indikator tersebut TIDAK BERLAKU untuk anggota keluarga atau keluarga yang bersangkutan (tidak dijumpai)

Σ Keluarga : Adalah jumlah keluarga yang ada di masing-masing wilayah (bukan jumlah dari per masing-masing indikator)

Sumber: <http://www.keluargasehat.kemkes.go.id> diakses pada 31 Desember 2024

Kinerja Sasaran 1 “Terwujudnya Keluarga Sehat” pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Keluarga Sehat <u>Meta Indikator :</u> Indikator ini diukur dari 12 indikator utama sebagai perhitungan IKS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.	0,35	0,36	0,396 (jumlah keluarga di DIY yang memiliki IKS lebih dari 0,8 sebanyak 386.474 keluarga dibagi Jumlah Keluarga di DIY sebanyak 976.847 keluarga)	110% (0,396 / 0,36 x 100%)	0,45	88% (realisasi tahun 2024 sebesar 0,396 dibagi target akhir renstra sebesar 0,45 dikali 100%)

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: terwujudnya keluarga sehat adalah sebagai berikut:

- Tercapai 0,396 atau persentase realisasi terhadap target sebesar 110%. Dengan demikian realisasi terhadap target sebesar 0,36 terlampaui.
- Dibandingkan tahun 2023 capaian IKS tahun 2024 mengalami kenaikan indeks sebesar 0,046 dari 0,35 menjadi 0,396. Sasaran strategis 1 “Terwujudnya Keluarga Sehat” dengan IKS sebagai indikator kinerja sudah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Kesehatan DIY tahun 2022 - 2027.
- Capaian target indikator sasaran terwujudnya keluarga sehat pada tahun 2024 terhadap target akhir renstra tahun 2027 sebesar 88%.

Keberhasilan capaian Sasaran 1, dengan indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III. 8 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (1.02.02)		1. Persentase fasyankes terakreditasi	54,32%	71,64%	131,89%
		2. Persentase Keberhasilan Pengobatan TBC	85%	85,13%	100,15%
		3. Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV)	62%	62,91%	101,47%
		4. Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria	100%	100%	100%
		5. Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur	77%	78,13%	101,47%
		6. Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur	77%	84,2%	109,35%
		7. Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara	15%	15,93%	106,20%
		8. Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas	30%	36,61%	122,03%
		9. Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar	72%	91,1%	126,53%
		10. Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)	6,4%	6,4%	100,00%
		11. Persentase Remaja Putri Anemia	21,5%	20,74%	103,53%
		12. Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta	100%	100%	100,00%
	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan	100%	100%	100%
	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	2 unit	2 unit	100%

PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
	Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Fasilitas Layanan Kesehatan			
	1.02.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional <i>Maintenance Center</i> yang Disediakan dan Dipelihara	1 unit	1 unit	100%
	1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1 unit	1 unit	100%
	1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 11.000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 unit	1 unit	100%
	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Pelayanan Kesehatan dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan • Penyediaan Layanan 	2 Unit 100% 67 dokumen	2 Unit 100% 67 dokumen	100% 100% 100%

PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
		Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
	1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	438 orang	438 orang	100%
		Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT	100%	100%	100%
		Persentase RS memenuhi standar <i>kredensialing</i>	84,81%	91,14%	107,46%
		Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%
	1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28.215 orang	28.215 orang	100%
		Persentase <i>respons time</i> SKDR PD3I kurang dari 24 jam	90%	93,61%	104,01%
		Persentase bayi usia 18 s.d. 24 bulan yang mendapatkan imunisasi <i>booster</i> campak dan rubela	92,7%	79,3%	85,54%
		Persentase bayi usia 0 – 11 bulan yang mendapat IDL (imunisasi dasar lengkap)	97,42%	92,9%	95,36%
		Jumlah Kalurahan/Kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM	247	355	143,72%
		Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)	77%	50%	64,94%
		Pengelolaan pelayanan Kesehatan dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	100%	100%	100%
	1.02.02.1.02.0003	Dokumen Hasil	6 dokumen	6 dokumen	100%

PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			
		Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Dokumen Pengelolaan Surveilans KIA	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Persentase pelayanan kesehatan balita	85%	92,54%	108,87%
		Persentase K6	60%	81,52%	135,42%
		Persentase KN Lengkap	70%	84,22%	120,31%
		Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah	12%	91,29%	760,75%
		Persentase lansia mendapat layanan kesehatan	54%	76,37%	141,43%
		Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ	100%	100%	100%
		Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa	60%	100%	166,67%
		Dokumen Pelaksanaan Imunisasi Rutin Lengkap	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Dokumen Pelaksanaan Imunisasi Antigen Baru	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.02.02.1.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 dokumen	3 dokumen	100%
	1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dokumen	1 dokumen	100%

PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
	1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 dokumen	4 dokumen	100%
	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 dokumen	8 dokumen	100%
		Dokumen Pengelolaan Penyakit HIV	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Dokumen Pengelolaan Penyakit Tuberkulosis (TB)	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Dokumen Pengelolaan Penyakit Malaria	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Dokumen Pengelolaan Penyakit Tidak Menular (PTM)	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Dokumen Pengelolaan Penyakit Hepatitis	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Dokumen Pengelolaan Kerja Sama Lintas Program dan Lintas Sektor	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Dokumen Pengelolaan Penyakit DBD dan Zoonosis	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan	Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Grhasia)	Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 dokumen	1 dokumen	100%

PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
	1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	<i>Public Safety Center</i> (PSC 119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	1 unit	100%
	1.02.02.1.02.0030 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	814.300 keluarga	976.847 keluarga	119,96%
	1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan	100%	100%	100%
	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 dokumen	3 dokumen	100%
		Persentase Pengelolaan Data, Informasi, dan Sistem Informasi Kesehatan	100%	100%	100%
	1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Pemenuhan Perizinan	100%	100%	100%
	1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti Perizinannya	32 unit	32 unit	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (1.02.03)	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	311 unit	311 unit	100%
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	55,73%	62,97%	112,99%
		Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan	87	90,52	104,05
	1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber	Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di	87,53%	90,93%	103,88%

PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
	Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			
	1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	28.228 orang	30.010 orang	106,31%
	1.02.03.1.01.0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	5 orang	5 orang	100%
	1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terwujudnya peningkatan kompetensi dan pemenuhan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	100%	100%
	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	710 orang	1.703 orang	239,86%
		Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan	99,48%	99,76%	100,28%
	1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	100%
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman (1.02.04)		Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi	75,47	82,97	109,94
		Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi	88	92,59	105,22
	1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Terwujudnya peningkatan kepatuhan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan	100%	100%	100%
	1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF	PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakan Lanjut Penerbitan	1 sarana	1 sarana	100%

PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
	Cabang dan Cabang PAK	Perizinan			
		Terwujudnya peningkatan kepatuhan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan	100%	100%	100%
	1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Meningkatnya kepatuhan Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan	100%	100%	100%
	1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (1 sarana)	1 sarana	1 sarana	100%
		Meningkatnya kepatuhan Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan	100%	100%	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (1.02.05)		Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	100%	100%
	1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	100%	100%	100%
	1.02.05.1.01 .0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Persentase kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	100%	100%	100%
Program Penyelenggara-		Persentase pembinaan kesehatan tradisional	20%	20%	100%

PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
raan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (2.22.08)	2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Tersedianya sarana prasarana untuk pelayanan kesehatan tradisional	100%	100%	100%
	2.22.08.5.08.0004 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Pelayanan Kesehatan Tradisional	1 unit	1 unit	100%
		Penyehat Tradisional yang Didampingi untuk Mendapatkan SPTP	300 orang	300 orang	100%
		Gebyar Kampanye Kesehatan Tradisional	1 event	1 event	100%
		Tersedianya sarana prasarana untuk pelayanan kesehatan tradisional	100%	100%	100%
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (1.03.13)		Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang	0,35	0,35	100%
	1.03.13.5.04 Sarana Dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung pengembangan layanan RS Jiwa Grhasia	1 unit	1 unit	100%
	1.03.13.5.04.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang (Grhasia)	Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten	Jumlah fasilitas pengembangan layanan RS Jiwa Grhasia	1 unit	1 unit	100%
	1.03.13.5.02.0008 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	1 dokumen	1 dokumen	100%

Capaian tersebut didukung dari:

- a. Capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ketercapaian program didukung oleh 9 kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Kesehatan

Masyarakat, Bidang Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Sekretariat serta semua UPT dan UOBK pada Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

- 1) Kerja sama lintas sektor terutama dalam Tim Percepatan Penanggulangan TBC DIY (SK Gub DIY No.55/TIM/2022), Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria DIY (SK Gub DIY No.89/TIM/2022), Tim Koordinasi Pencegahan dan pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru (SK Gub DIY No.116/TIM/2024), dan jejaring *pentahelix* lainnya.
 - 2) Komunikasi dan sinkronisasi dengan kabupaten/kota dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian masalah.
 - 3) Koordinasi dan kolaborasi dalam menyiapkan integrasi layanan primer yang mendukung layanan kesehatan masyarakat baik dari sisi layanan kesehatan primer, laboratorium kesehatan masyarakat dan posyandu.
- b. Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)

Tercapai 100% didukung oleh 2 kegiatan yaitu: Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi dan kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi. Beberapa Upaya yang dan dukungan untuk memenuhi target adalah:

1. Melakukan pemutakhiran data Sumber Daya Kesehatan melalui aplikasi SISDMK, menyusun rencana kebutuhan tenaga Kesehatan tahunan, dan melaksanakan uji kompetensi, bersama Dinas Kesehatan kabupaten/kota, RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan organisasi profesi bidang Kesehatan.
2. Dukungan Organisasi Profesi, BPJS Kesehatan untuk mendukung Fasilitas kesehatan memenuhi standar perizinan fasilitas kesehatan, standar Kemenkes dan PMK nomor 43 tahun 2019.
3. Dukungan BKD/BKPP/BKPSDM dan Biro Organisasi/Bagian Organisasi untuk pemenuhan SDMK di Puskesmas, RSUD Kab/Kota dan RS Khusus di Provinsi.
4. Dukungan Regulasi, Sistem aplikasi SISDMK, dan Kementerian Kesehatan dalam mendukung pembinaan dan pengawasan SDMK di Fasyankes
5. Dukungan teknologi digital untuk kemudahan dalam kegiatan.

- c. Capaian Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Tercapai 100% didukung oleh terlaksananya kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) serta kegiatan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:
1. Pelaksanaan Bimtek untuk seluruh Apoteker Penanggung Jawab PBF Cabang DIY dalam format daring dengan materi terkait Pengawasan dan Pengendalian Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP) dan aplikasi SIPNAP, serta Pengawasan Pemberian Obat Antibiotik Tanpa Resep Dokter.
 2. Kegiatan Bimtek untuk seluruh Penanggung Jawab Teknis Cabang Distributor Alat Kesehatan (alkes) di DIY dilakukan secara luring dengan materi kebijakan sertifikasi CDAKB untuk sarana distributor alkes.
 3. Visitasi dan pembinaan sarana distributor obat dan alat kesehatan di DIY baik pada proses perizinan maupun pembinaan sarana yang sifatnya rutin, selama tahun 2024 dilakukan visitasi ke sarana sebanyak 48 sarana.
 4. Bimtek untuk apoteker penanggung jawab sarana UKOT di DIY secara daring dengan materi tentang perizinan berbasis resiko untuk UKOT, standar Cara produksi Obat yang Baik (CPOTB) dan *desk update* data UKOT yang ada di DIY.
- d. Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tercapai 100% dengan indikator Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dihitung dari kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi. Beberapa Upaya yang dilakukan antara lain:
- 1) Penguatan jejaring kemitraan lintas sektor, seperti tim RAD *Stunting*, RAD Germas dan jejaring *pentahelix*.
 - 2) Komunikasi yang intensif dengan kabupaten/kota dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian masalah.
 - 3) Koordinasi dan kolaborasi dalam menyiapkan integrasi layanan primer yang mendukung layanan kesehatan masyarakat baik dari sisi layanan kesehatan primer, laboratorium kesehatan masyarakat dan posyandu.
- e. Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Tercapai 100% dengan dukungan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Beberapa aktivitas yang dilakukan adalah pertemuan pendampingan penyehat tradisional mendapatkan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) di kabupaten/kota, ekspose pendampingan penyehat tradisional mendapatkan STPT di DIY dan kampanye kesehatan tradisional.

f. **Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang**

Tercapai 100% dengan tercapainya indikator peningkatan layanan RS Jiwa Grhasia dalam mendukung kesesuaian tata ruang. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) baru yang telah dilengkapi dengan sarana prasarana dan alat kesehatan yang mampu memberikan layanan untuk pasien jiwa dan non jiwa.

Faktor Pendukung keberhasilan

Faktor pendukung capaian 12 indikator IKS adalah sebagai berikut:

a. **Keluarga mengikuti program KB**

Dukungan untuk capaian program KB antara lain: menjalin kerja sama dengan lintas sektor dalam peningkatan capaian program KB, bersama BKKBN DIY dan DP3AP2 DIY mendorong terbitnya SE Gubernur tentang KB Pasca salin, dan mengadakan pelatihan bagi petugas dalam pelayanan kontrasepsi.

b. **Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan**

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: pelaksanaan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) melalui program kelas ibu hamil (bumil) di puskesmas, pelaksanaan ANC terpadu bumil di puskesmas, koordinasi penyediaan USG di puskesmas (pengadaan oleh pusat, provinsi berkoordinasi untuk memastikan puskesmas memiliki), dan peningkatan kapasitas Nakes melalui pelatihan kegawatdaruratan maternal neonatal.

c. **Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap**

Capaian imunisasi dasar lengkap didukung dengan KIE yang rutin dilakukan selama kehamilan melalui kelas bumil, kunjungan neonatal maupun posyandu. Pelibatan lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan program imunisasi di DIY mampu meningkatkan cakupan imunisasi di DIY. Selain melibatkan lintas sektor, kegiatan program imunisasi DIY juga didukung oleh organisasi

kemasyarakatan non pemerintah (NGO) seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kwarda Pramuka DIY, WHO, UNICEF, CHAI. Peran aktif kader kesehatan di masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pencapaian program imunisasi di DIY.

d. Bayi mendapatkan ASI Eksklusif

Upaya yang telah dilakukan antara lain: penguatan kapasitas Nakes melalui pelatihan konseling menyusui, pemberian makan bagi bayi dan anak (PMBA), *refreshing/update* informasi bagi konselor menyusui, dan pemantauan pemberian ASI Eksklusif dan KIE menggunakan buku KIA.

e. Pertumbuhan Balita dipantau

Dukungan untuk capaian Pertumbuhan Balita dipantau diantaranya adalah: monitoring pelaksanaan pemantauan pertumbuhan di posyandu secara rutin melalui sistem surveilans sigizi terpadu, koordinasi penyediaan alat antropometri untuk pemantauan pertumbuhan di posyandu (pengadaan oleh pusat, tetapi provinsi berkoordinasi untuk memastikan seluruh posyandu memiliki alat antropometri terstandar), dan pelatihan kapasitas Nakes melalui pelatihan SDIDTK - PMBA (Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang – Pemberian Makan Bayi dan Anak).

f. Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar

Upaya yang telah dilakukan antara lain memperkuat kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan baik klinik, puskesmas, maupun rumah sakit dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif khususnya tentang TBC. Upaya lainnya untuk meningkatkan cakupan penemuan TBC, angka keberhasilan pengobatan TBC, pemberian Terapi Pencegahan TBC, dan indikator lainnya menuju eliminasi TBC 2030 adalah melibatkan mitra non pemerintah baik bidang kesehatan maupun non kesehatan seperti LSM atau komunitas TBC (Siklus Indonesia), Organisasi Penyintas TBC (Yayasan “Terbesar”), Perusahaan Swasta, Filantropi serta melibatkan mitra perguruan tinggi. Semua komponen tersebut juga sudah terkoordinasi dalam Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis DIY melalui SK Gubernur DIY Nomor 55/TIM/2022 tanggal 21 Maret 2022 dan dalam proses penyusunan RAD Penanggulangan TBC. Konsistensi penemuan kasus aktif melalui pemeriksaan *mobile* rontgen beserta pelibatan multisektor telah membawa DIY menjadi provinsi terbaik pertama dalam

Pelaksanaan Program TBC Tahun 2024 dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI.

g. Penderita hipertensi yang berobat teratur

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian penderita hipertensi yang berobat teratur antara lain: optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta serta pelibatan lintas sektor untuk penemuan/deteksi dini hipertensi dalam posyandu dalam kerangka integrasi pelayanan kesehatan primer, bimbingan teknis puskesmas dalam pelayanan terpadu penyakit tidak menular dan penguatan manajemen hipertensi terkendali termasuk pencatatan kohort pasien hipertensi untuk pemantauan, promosi kesehatan terkait dengan hipertensi pada semua lapisan masyarakat dengan jargon CERDIK dan PATUH untuk pencegahan hipertensi dan komplikasinya, dan koordinasi lintas sektor lainnya (*pentahelix*).

h. Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan

Kegiatan yang dilakukan untuk diantaranya adalah: pelatihan tata laksana kesehatan jiwa untuk nakes, pelatihan promotif dan preventif kesehatan jiwa untuk nakes, optimalisasi Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) pada tingkat provinsi sampai ke tingkat kalurahan, gerakan deteksi dini pada semua siklus kehidupan seperti di sekolah, pembentukan kelompok swabantu, penguatan tim kesehatan jiwa terpadu di puskesmas melalui pelatihan bagi Nakes, dan advokasi untuk pembuatan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) kesehatan jiwa.

i. Anggota keluarga tidak ada yang merokok

Upaya yang dilakukan antara lain: Skrining merokok pada usia sekolah untuk mencegah *new smoker* (perokok baru), optimalisasi dan pendampingan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di wilayah kabupaten kota, advokasi perda untuk kabupaten/kota terkait dengan KTR, optimalisasi UBM (upaya berhenti merokok), pelatihan UBM untuk tenaga kesehatan, deteksi dini untuk penemuan penyakit terkait perilaku merokok (kanker paru, penyakit paru obstruktif kronis, tuberkulosis, ISPA/pneumonia, dll), promosi kesehatan dan advokasi lintas sektor, dan perencanaan pembuatan satgas KTR di Pemda DIY dan pelibatan lintas sektor (*pentahelix* lainnya).

j. Keluarga sudah menjadi anggota JKN

Dukungan untuk capaian keluarga suah menjadi anggota JKN diantaranya adalah redistribusi kepesertaan, pembinaan dan monitoring evaluasi rujukan non *spesialistik*, penguatan jejaring, pembentukan tim pertimbangan klinis, dan fasilitasi *kredensialing* bagi fasyankes.

k. Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih

Kegiatan pendukung capaian adalah fasilitasi Surveilans Kualitas Air Minum di DIY, pengadaan *Sanitarian kit* dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan Sosialisasi dan pemeriksaan air minum masyarakat.

l. Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pertemuan Hasil Verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh Kader, orientasi verifikasi Desa STBM bagi kader, penguatan Kapasitas Penyehatan Lingkungan Studi *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA).

Faktor Penghambat keberhasilan

a. Aplikasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) merupakan salah satu sistem informasi yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan, dan daerah tidak dapat memutakhirkan data pada setiap waktu (*real time*). Aplikasi ini tidak bisa di buka setiap saat oleh daerah untuk melihat progres pencapaian Indeks Keluarga Sehat, dan ketercapaian masing-masing indikatornya.

Di samping itu masih ada beberapa aplikasi di daerah yang lebih dahulu diimplementasikan belum bisa diintegrasikan dengan aplikasi baru dari pusat. Hal ini terjadi pada aplikasi Sistem Informasi Imunisasi Terpadu (SIMUNDU) yang tidak bisa diintegrasikan dengan aplikasi yang berlaku nasional Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK), sehingga daerah harus beralih menggunakan ASIK. Mitigasi risiko yang telah dilakukan terkait aplikasi PISPK adalah dengan melakukan validasi dan koordinasi data PISPK di setiap kabupaten/kota. Sedangkan kendala di aplikasi ASIK, mitigasi risiko yang dilakukan adalah percepatan entri aplikasi baru tersebut dengan pendampingan intensif di fasilitas pelayanan kesehatan.

- b. Perubahan kebijakan dari pusat yang sangat dinamis. Mitigasi risiko yang dilakukan adalah dengan melakukan upaya percepatan sesuai dengan kemampuan dan mempertimbangkan kearifan lokal
- c. Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia dari sisi jumlah dan kualifikasinya. Mitigasi risiko yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan mahasiswa magang di Dinas Kesehatan DIY.

Sasaran 2: Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah sebagaimana Indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III. 9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Sumber data diolah dari Hasil Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 37 (tiga puluh tujuh) OPD. Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024, menggunakan indikator yang dirumuskan oleh Perangkat Daerah *leading sector* Reformasi Birokrasi General dan Perangkat Daerah Koordinator Reformasi Birokrasi Tematik yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 436/KEP/2024 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah DIY Tahun 2024. Pelaksanaan Evaluasi RB Perangkat Daerah tersebut menggunakan instrumen dan indikator yang diturunkan dari Keputusan Menteri PAN dan RB RI Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 yang telah disesuaikan.

Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024 menggunakan skema dan bobot nilai sebagai berikut:

Tabel III. 10 Skema dan bobot nilai Evaluasi Reformasi Perangkat Daerah

No	Uraian	Bobot	Keterangan
Reformasi Birokrasi General			
A	Strategi Pelaksanaan RB General	10	1 indikator
B	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	40	

No	Uraian	Bobot	Keterangan
	Sasaran 1 : Tata Kelola pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif	32	12 indikator
	Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	8	2 indikator
C	Capaian sasaran Strategis RB	50	
	Sasaran 1 : Tata Kelola pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif	28	4 indikator
	Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	22	3 indikator
Total RB General		100	
Reformasi Birokrasi Tematik			
A	Capaian Evaluasi RB Tematik Pengentasan Kemiskinan	5	5 indikator
B	Capaian Evaluasi RB Tematik Pengendalian Inflasi	5	4 indikator
C	Capaian Evaluasi RB Tematik Peningkatan Investasi	5	2 indikator
D	Capaian Evaluasi RB Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri	5	3 indikator
E	Capaian Evaluasi RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (<i>Stunting</i>)	5	5 indikator
Total RB Tematik		20	
Total Nilai RB		120	

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel III. 11 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2024

No	Unit Kerja	Nilai RB General 2024	Nilai RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	Kategori	Predikat	Nilai RB General 2023	Nilai RB Tematik 2023	INDEKS RB 2023	GAP
1	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	86,95	8,92	95,87	A	Memuaskan	83,77	5,81	89,58	6,29
2	Biro Hukum Setda DIY	84,28	5,85	90,13	A	Memuaskan	83,93	5,30	89,23	0,91
3	Biro Organisasi Setda DIY	87,57	9,06	96,63	A	Memuaskan	86,97	5,41	92,38	4,25
4	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY	83,26	5,18	88,44	A	Memuaskan	83,04	4,63	87,67	0,77
5	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	83,51	10,23	93,74	A	Memuaskan	83,46	8,00	91,46	2,29
6	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	86,60	6,88	93,48	A	Memuaskan	85,25	6,49	91,74	1,74
7	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	83,78	8,29	92,07	A	Memuaskan	83,67	4,50	88,17	3,90
8	Biro Bina	83,31	5,00	88,31	A	Memuaskan	83,39	5,25	88,64	-0,33

No	Unit Kerja	Nilai RB General 2024	Nilai RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	Kategori	Predikat	Nilai RB General 2023	Nilai RB Tematik 2023	INDEKS RB 2023	GAP
	Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY									
9	Paniradya Kaistimewan	84,31	9,68	93,99	A	Memuaskan	86,75	6,43	93,18	0,81
10	Sekretariat DPRD DIY	83,65	5,11	88,76	A	Memuaskan	77,60	4,33	81,93	6,83
11	Inspektorat DIY	89,25	6,99	96,24	A	Memuaskan	86,83	6,30	93,13	3,11
12	Dinas Pariwisata DIY	84,64	8,51	93,15	A	Memuaskan	82,67	5,73	88,40	4,75
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY	86,95	12,05	99,00	A	Memuaskan	85,72	6,87	92,59	6,41
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	84,07	11,40	95,47	A	Memuaskan	83,43	8,07	91,50	3,97
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	85,45	12,00	97,45	A	Memuaskan	82,60	6,97	89,57	7,88
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	84,94	7,61	92,55	A	Memuaskan	83,22	5,75	88,97	3,58
17	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	85,22	11,94	97,16	A	Memuaskan	83,95	6,81	90,76	6,40
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	85,47	8,46	93,93	A	Memuaskan	84,74	6,71	91,45	2,48
19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	83,49	12,39	95,88	A	Memuaskan	81,34	6,91	88,25	7,63
20	Dinas Perhubungan DIY	82,98	7,19	90,17	A	Memuaskan	83,79	5,25	89,04	1,13
21	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana) DIY	83,26	7,38	90,64	A	Memuaskan	85,39	4,80	90,19	0,45
22	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	86,94	12,54	99,48	A	Memuaskan	86,71	8,25	94,96	4,52
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY	85,06	7,55	92,61	A	Memuaskan	86,42	6,17	92,59	0,03
24	Dinas Kesehatan DIY	87,83	9,64	97,47	A	Memuaskan	86,10	6,62	92,72	4,75
25	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	82,52	9,94	92,46	A	Memuaskan	76,32	6,10	82,42	10,04
26	Dinas Perpustakaan dan	89,36	6,94	96,30	A	Memuaskan	84,42	2,36	86,78	9,51

No	Unit Kerja	Nilai RB General 2024	Nilai RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	Kategori	Predikat	Nilai RB General 2023	Nilai RB Tematik 2023	INDEKS RB 2023	GAP
	Arsip Daerah DIY									
27	Dinas Sosial DIY	86,52	8,74	95,26	A	Memuaskan	86,13	7,00	93,13	2,13
28	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	82,61	6,29	88,90	A	Memuaskan	82,35	4,24	86,59	2,32
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY	85,13	9,11	94,24	A	Memuaskan	84,43	5,52	89,95	4,29
30	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	80,52	4,55	85,07	A	Memuaskan	81,91	4,00	85,91	-0,84
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	88,83	10,25	99,08	A	Memuaskan	88,11	7,32	95,43	3,66
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	87,67	7,22	94,89	A	Memuaskan	88,56	5,85	94,41	0,48
33	Badan Kepegawaian Daerah DIY	89,65	7,04	96,69	A	Memuaskan	90,47	4,10	94,57	2,12
34	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	88,09	8,04	96,13	A	Memuaskan	87,61	4,44	92,05	4,08
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	85,71	5,65	91,36	A	Memuaskan	83,74	4,97	88,71	2,66
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	80,83	6,33	87,16	A	Memuaskan	82,20	3,65	85,85	1,31
37	Badan Penghubung Daerah DIY	84,30	4,13	88,43	A	Memuaskan	79,88	2,53	82,41	6,03
RATA-RATA		85,26	8,22	93,48			84,24	5,66	89,90	3,58

Sumber data : Biro Organisasi Setda DIY 2025

Tabel III. 12 Kategori Hasil Evaluasi RB Tahun 2024 berdasar PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Kriteri a	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	> 100	Sangat Memuask an	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK
2	A	>80 - 100	Memuask an	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan

No	Kriteria	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
	A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
4	B	>60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
6	C	>30 - 50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
7	D	0 -30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK

Kinerja sasaran Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pada Perangkat Daerah tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 13 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kategori RB Perangkat Daerah Meta Indikator: Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A (92,72)	A (92,75)	A (97,47) (Penilaian atas RB Tematik dan RB General oleh Biro Organisasi)	105,09 % Persentase realisasi terhadap (target dibagi capaian dikalikan 100%)	A (93)	104,81% (target akhir renstra sebesar 93 dibagi realisasi tahun 2024 sebesar 97,47 dikalikan 100%).

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

- Berdasarkan hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024, Dinas Kesehatan DIY mendapatkan nilai skor Indeks RB Perangkat daerah 97,47 dengan Kategori A (Memuaskan).
- Target tahun 2024 sebesar 92,75 dengan realisasi 97,47 dengan kategori A, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 105,09% (terlampaui)
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 92,72, terdapat kenaikan sebesar 4,75.
- Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2027 sebesar 104,81 %.

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator Kategori RB Perangkat Daerah tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III. 14 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan terhadap Sasaran 2

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,06	92,03	103,33%
	1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Diskes DIY	100%	100%	100%
	1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	1.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	100%
	1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%
	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan	Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	224 orang/bula	224 orang/bul	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6
	Tunjangan ASN		n	an	
	1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%
	1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
	1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	100%
	1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengamanan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
	1.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
	1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%
	1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
	1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1 laporan	1 laporan	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Konsultasi SKPD			
	1.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan	100%	100%	100%
	1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	100%
	1.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	100%
	1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran Diskes DIY	100%	100%	100%
	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100%
	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100%
	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	1 laporan	100%
	1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perkantoran	100%	100%	100%
	1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100%
	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 unit	47 unit	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6
	Lapangan				
	1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 unit	85 unit	100%
	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%

Capaian tersebut didukung dari

- Capaian Hasil Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Capaian nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan tahun 2024 sebesar 92,03 terealisasi 103,33% dari target yang ditetapkan sebesar 89,06.

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Ketersediaan dukungan regulasi dari Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan cukup keleluasaan Dinas Kesehatan DIY dalam melaksanakan reformasi birokrasi.
- b. Peningkatan pemahaman dan komitmen dari pimpinan dan para pegawai Dinas Kesehatan DIY dalam mengimplementasikan Budaya Pemerintahan Satriya.
- c. Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun Dana Keistimewaan, koordinasi dan kerja sama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana di Dinas Kesehatan DIY.

Faktor Penghambat keberhasilan

Kontinuitas penerapan budaya pemerintahan Satriya memerlukan kerja sama dan komitmen yang kuat agar dapat dilaksanakan secara konsisten. Mitigasi risiko yang dilakukan adalah dengan sosialisasi dan pemantauan penerapan nilai budaya pemerintahan Satriya secara periodik.

3.2. Capaian Kinerja Lainnya

a. SPM

Dalam rangka mencapai target yang ditetapkan dalam pelaksanaan SPM di DIY diperkuat dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Istimewa Yogyakarta 2023-2027. Capaian 2 (dua) Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan bagi Pemerintah Provinsi, adalah sebagai berikut:

Tabel III. 15 Target dan Pencapaian SPM Kesehatan DIY Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Penerima Layanan	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	583	100%	1 tahun
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	157.490	100%	1 tahun

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2024

b. Sustainable Development Goals (SDGs)

Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan *road map* yang disepakati secara universal untuk menjembatani kondisi sosial dan ekonomi menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan lebih baik. Dinas Kesehatan mendukung 3 tujuan SDG's yaitu:

1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan
2. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
3. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Permasalahan kesehatan dalam SDGs diintegrasikan ke dalam satu tujuan, yaitu tujuan nomor 3 (Kesehatan yang baik dan kesejahteraan) untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua orang dari segala usia. Dalam rangka mewujudkan tujuan

nomor 3, upaya yang dilakukan terakomodir melalui kegiatan-kegiatan di dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. Capaian bidang kesehatan yang sesuai dengan Rencana Program/Kegiatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya:

- a. DIY merupakan provinsi yang memiliki tingkat pencapaian kinerja program imunisasi terbaik di Indonesia. Sejak tahun 2012, seluruh desa (100%) yang ada di DIY telah masuk dalam kategori desa UCI (*Universal Child Immunization*). UCI adalah suatu indikasi yang menggambarkan bahwa 90% penduduk di desa tersebut telah menjalankan imunisasi. Cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) bersifat fluktuatif, pada tahun 2022 mencapai 97,6%, tahun 2023 naik menjadi 97,49 dan tahun 2024 mengalami penurunan 1,39% sehingga menjadi 96,1%;
- b. Prevalensi *stunting* bersifat fluktuatif setiap tahunnya (indikator *inversi*), pada tahun 2022 sebesar 9,10% dan pada tahun 2023 Kementerian Kesehatan melaksanakan Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Sesuai dengan data SKI 2023, prevalensi *stunting* di DIY berada di angka 18%;
- c. Kasus kematian ibu di DIY juga bersifat fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2022 kematian Ibu sebanyak 43 kasus, tahun 2023 kembali turun menjadi 22 kasus akan tetapi di tahun 2024 naik 3 kasus sehingga menjadi 25 kasus kematian ibu;
- d. Kasus kematian bayi pada tahun 2022 sebanyak 303 kasus. Pada tahun 2023 turun menjadi 274 kasus, dan pada tahun 2024 naik 11 kasus menjadi 285 kasus;
- e. Kasus balita gizi kurang pada tahun 2022 terdapat 8.290 (5,20%) kasus, tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 6.900 (4,52%) kasus, dan di tahun 2024 naik menjadi 8.806 (5,12%);
- f. Ketersediaan tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit di DIY pada umumnya sudah baik, yang masih menjadi permasalahan adalah persebarannya belum merata antar kabupaten/kota di DIY terutama Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul;

- g. Masyarakat di DIY yang telah terjangkau jaminan pembiayaan kesehatan sebanyak 99,61%.

3.3. Capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap capaian sasaran Pemda DIY dan Program Pemda

Sebagaimana amanat *cascading* Kinerja Dinas Kesehatan DIY memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dan Program pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel III. 16 Kontribusi Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	% Realisasi	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Kualitas SDM Yogyakarta yang Dapat Diandalkan	1. Indeks Pembangunan Manusia	81,36	81,62	100,32 %	Tujuan OPD : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) pada Balita	11,7	10,76	108,03 %
		2. Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,78	67,9	90,80%					
						Sasaran 1: Terwujudnya keluarga sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,36	0,396	110%
2.	Meningkatnya <i>Good Governance</i>	1. Opini BPK	WTP	WTP	100%	Sasaran 2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A (92,75)	A (97,47)	105,09 %
		2. SAKIP	AA	AA	100%					
		3. Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi	100%					

Tujuan Dinas Kesehatan “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” berkontribusi pada 2 (dua) sasaran Pemda “Kualitas SDM Yogyakarta yang Dapat Diandalkan” dan “Meningkatnya *Good Governance*”. Adapun sasaran dinas kesehatan terwujudnya keluarga sehat berkontribusi pada sasaran Pemda “Kualitas SDM Yogyakarta yang Dapat Diandalkan” dan sasaran meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah mendukung tercapainya sasaran pemda “Meningkatnya *Good Governance*”.

Penjelasan:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun melalui 4 (empat) dimensi dasar, salah satu dimensinya adalah umur panjang dan sehat yang dinilai dari Angka Harapan Hidup (AHH). AHH penduduk DIY konsisten berada di atas capaian nasional. Tahun 2024 capaian nasional sebesar 72,39 dan AHH penduduk DIY dari target yang ditetapkan sebesar 75,18 tercapai sebesar 75,36 dengan persentase capaian sebesar 100,24%. Sasaran Dinas Kesehatan DIY “Terwujudnya Keluarga Sehat” melalui tujuan “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” mendukung pencapaian sasaran Pemda “Kualitas SDM Yogyakarta yang Dapat Diandalkan”.
2. Dinas Kesehatan sebagai Perangkat Daerah yang memiliki ketugasan mengimplementasikan perbaikan Tata kelola Pemerintahan yang tergambarkan pada perolehan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada kategori A. Indeks RB kategori A pada Perangkat Daerah diperoleh melalui Evaluasi RB Perangkat Daerah Tahun 2024 yang telah mengakomodir indikator-indikator penilaian RB General (kualitas tata kelola internal) dan indikator RB Tematik (kualitas dampak pada tematik sebagaimana tertera pada PermenPAN nomor 9 dan KepmenPAN RB Nomor 182 tahun 2024).

Sebagai Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan juga berkontribusi dalam perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah dibuktikan dengan melaksanakan RB *general* dan menjadi koordinator RB tematik. Dinas Kesehatan memiliki sasaran penunjang Meningkatkan Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah.

Bukti telah melakukan tata kelola dengan baik yakni di tahun 2024 indeks RB Dinas Kesehatan mendapatkan kategori A. Dinas Kesehatan juga merupakan sebagai *leading sektor* RB tematik digitalisasi *stunting* sehingga berkontribusi signifikan terhadap capaian RB di level Pemda. Sasaran penunjang tersebut melalui tujuan Dinas Kesehatan mendukung pencapaian sasaran Pemda Meningkatkan *Good Governance* terutama indikator Opini BPK dan SAKIP

**Tabel III. 17 Kontribusi Program Dinas Kesehatan DIY terhadap Capaian Program
Pemerintah Daerah**

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Tar- get	Realisa- sasi	% Realisa-si	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisa- si	% Realisa-si
1	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	1. Angka Harapan Hidup (AHH)	75,18	75,36	100,24%	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasyankes terakreditasi	54,32 %	71,64 %	131,89 %
		2. Prevalensi <i>Stunting</i>	14%	18% (SKI, 2023)	71,43% (<i>Indikator Inversi</i>)		Persentase Keberhasilan Pengobatan TBC	85%	85,13 %	100,15 %
		3. Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Dasar Layak	98,23	96,81	98,55%		Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV)	62%	62,91 %	101,47 %
							Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria	100%	100%	100%
							Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur	77%	78,13 %	101,47 %
							Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur	77%	84,2%	109,35
							Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara	15%	15,93 %	106,2%
							Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas	30%	36,61	122,03
							Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar	72%	94,46 %	131,19 %

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	% Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	% Realisasi
							Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)	6,4%	6,4%	100%
							Persentase Remaja Putri Anemia	21,5%	20,74	107,33 % (inverse)
							Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta	100%	100%	100%
						2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	55,73 %	62,97 %	112,99 %
							Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan	87%	90,52 %	104,05 %
						3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi	75,47 %	82,97 %	109,94 %
							Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi	88%	92,59 %	106,43 %
						4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	100%	100%

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	% Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	% Realisasi
						5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase pembinaan kesehatan tradisional	20%	20%	100%
						6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang	0,35%	0,35%	100%
2	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Indeks SPBE	86,67 3,64	87,03 4,53	100,42% 124,45%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,06	92,03	103,33 %

Dinas Kesehatan memiliki 6 (enam) program teknis, yaitu: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM); Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK); Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman; Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan; dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang. Keenam program tersebut berkontribusi terhadap Program Pemda “Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat” terutama pada indikator Angka Harapan Hidup (AHH) dan prevalensi *stunting*.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga memiliki program penunjang, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Program tersebut berkontribusi pada Program Pemda “Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah” yang memiliki indikator kepatuhan standar pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Penjelasan :

1. AHH merupakan indikator yang mencerminkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka harapan hidup di DIY mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 AHH di DIY mencapai 75,11, kemudian di tahun 2023 meningkat menjadi 75,18 dan di tahun 2024 meningkat kembali menjadi 75,36. AHH di DIY setiap tahunnya dapat melebihi nilai AHH nasional, di mana pada tahun 2024 AHH nasional berada di angka 72,39. Dinas Kesehatan DIY akan terus berupaya untuk meningkatkan AHH dengan berbagai upaya antara lain: menekan angka kematian (ibu, bayi, balita), perbaikan gizi masyarakat, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, serta pengendalian penyakit.
2. *Stunting* terjadi akibat kegagalan pada saat proses tumbuh kembang seorang anak karena kondisi kesehatan dan asupan gizi yang tidak optimal sehingga diperlukan peran *multi* sektor *multi stakeholder* dalam pencegahan dan penanganannya. Pencegahan dan penanganan permasalahan *stunting* dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Intervensi gizi spesifik untuk mengintervensi pada penyebab langsung *stunting* seperti layanan kesehatan dan gizi. Sedangkan intervensi gizi sensitif lebih pada intervensi penyebab tidak langsung seperti penyediaan akses air bersih dan aman, penyediaan rumah dan sanitasi sehat, penyediaan pangan aman, bergizi dan sehat, pola asuh, dan lingkungan sosial yang sehat.
Pada Tahun 2024 dari target Pemda DIY untuk prevalensi *stunting* sebesar 14%, Selama kurun waktu 2020 penurunan *stunting* kurang bermakna, berdasarkan SKI 2023 prevalensi *stunting* DIY mencapai 18% (Indonesia pada 21,5%).

3. Dalam rangka mencapai tujuan Pemda DIY terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik, Pemda DIY memiliki sasaran Meningkatnya *Good Governance*, di mana untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan sinergitas tata kelola perangkat daerah melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator Program Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi (PKKI). PKKI erat kaitannya dengan pengendalian dan evaluasi Kinerja Internal dan berkontribusi pada perbaikan tata kelola pemerintahan/reformasi birokrasi pengendalian dan evaluasi Kinerja Internal berkontribusi pada sinergitas dan koordinasi internal serta memperkuat komitmen Dinas Kesehatan DIY dalam mencapai target yang ditetapkan dalam melaksanakan kepatuhan terhadap standar pelayanan dan indeks kepuasan masyarakat. Pada tahun 2024, Dinas Kesehatan memperoleh:
 - a. Perihal kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, Dinas Kesehatan DIY telah dinilai oleh Ombudsman RI dengan hasil sebesar 96,32;
 - b. Survei kepuasan masyarakat (SKM) dengan nilai 93,63 dengan kategori sangat baik terhadap 5 (jenis) pelayanan: layanan informasi publik, layanan pengaduan, dan kegawatdaruratan PSC 119.

Penghargaan

Beberapa penghargaan yang berhasil diraih oleh Dinas Kesehatan DIY pada tahun 2024, diantaranya :

1. Tanda Penghargaan dalam Melakukan Sosialisasi Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Sebagai Dinas Kesehatan yang Paling Aktif dan Konsisten Melakukan Sosialisasi Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada 20 Mei 2024 oleh Kemenkes RI;
2. Penghargaan Dinas Kesehatan DIY Peringkat 1 dalam Pengendalian Resistensi Antibiotik tahun 2023 pada 31 Mei 2024 oleh Kemenkes RI;
3. Penghargaan Dinas Kesehatan DIY atas Dukungan dan Kontribusi dalam Pelaksanaan Pilot Project Perluasan *Smile* ATM Tahun 2023 pada 31 Mei 2024 oleh Kemenkes RI;
4. Penghargaan kepada Dinas Kesehatan DIY atas 100% *Risk Mapping and Recommendation for Emerging Infectious Diseases* pada Juni 2024 oleh Kemenkes RI;

5. Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Pemerintah Daerah dengan Dukungan APBD Untuk Perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan Tahun 2024 pada 29 Agustus 2024 oleh Kemenkes RI;
6. Penghargaan *Universal Health Coverage* pada 8 Agustus 2024 oleh Menteri Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI;
7. Penghargaan dan apresiasi kepada Dinas Kesehatan DIY atas usaha dan kerja kerasnya mencapai target ≥ 95 % dalam PIN Polio Tahap 2 Putaran 1 dan 2 oleh Kemenkes RI;
8. Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY pada tanggal 30 Agustus 2024 atas keberhasilan mencapai target *Non-Polio* AFP (NPAPF) Rate ≥ 3 per 100.000 penduduk <15 Tahun dan Discarded (bukan campak – bukan rubella) rate ≥ 2 per 100.000 penduduk pada tahun 2023 oleh Kemenkes RI;
9. Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY pada tanggal 11 Oktober 2024 atas Keberhasilan Mendukung Tercapainya Target Pelaporan Kasus Suspek *Congenital Rubella Syndrome* (CRS) ≥ 1 per 10.000 Kelahiran Hidup Pada Tahun 2023 oleh Kemenkes RI;
10. Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Peringkat III Kategori Provinsi dengan Persentase Tertinggi dalam penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik (RME) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Klinik, dan Praktik Mandiri pada 7 November 2024 oleh Kemenkes RI;
11. Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Peringkat V Kategori Provinsi dengan Kepatuhan Penggunaan Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) Tertinggi Nasional 2024 pada 7 November 2024 oleh Kemenkes RI;
12. Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Peringkat 2 Peningkatan Profil Kesehatan Tingkat Provinsi Tahun 2024 tanggal 7 November 2024 oleh Kemenkes RI;
13. Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Peringkat 1 Dinas Kesehatan Provinsi dengan Implementasi SMILE ATM (AIDS, TB, MALARIA) Terbaik Tahun 2024 pada 7 November 2024 oleh Kemenkes RI;
14. Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Peringkat Terbaik I Dalam Pembinaan Pelaporan Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas

- Pelayanan Kefarmasian Melalui Aplikasi SIMONA Tahun 2024 pada 7 November 2024 oleh Kemenkes RI;
15. Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Provinsi dengan Akselerasi Transformasi Digital Terbaik pada 7 November 2024 oleh Kemenkes RI;
 16. Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Peringkat II Instansi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan Terbaik Kategori Dinas Kesehatan Provinsi pada 7 November 2024 oleh Kemenkes RI;
 17. Penghargaan atas pencapaian Dinas Kesehatan Provinsi sebagian Provinsi Terbaik 1 dalam Pelaksanaan Program TBC Tahun 2024 pada 2 Desember 2024 oleh Kemenkes RI;

3.4. Analisis Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 14 Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran Belanja dan Efisiensi Anggaran Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisa si	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Pada Balita	11,7	10,76	108,03%				
1.	Terwujudnya keluarga sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,36	0,396	110%	112.091.838.425	107.158.323.224	95,60%	4.933.515.201 (4,40%)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A (92,75)	A (97,47)	105,09%	192.409.413.867	156.552.509.285	81,36%	35.856.904.582 (18,64%)
Jumlah						304.501.252.292	263.710.832.509	86,60%	40.790.419.783 (13,40%)

Sumber: <http://sengguh.jogjapro.go.id/>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan DIY Th 2024, Laporan Keuangan Dinas Kesehatan DIY Th 2024

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Dinas Kesehatan DIY melampaui target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp 304.501.252.292, terealisasi Rp 263.710.832.509 atau 86,60% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

Terdapat efisiensi Rp 40.790.419.783,00 atau 13,40% yang bersumber dari:

- Efisiensi belanja makanan dan minuman rapat
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Efisiensi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- Efisiensi Belanja Tagihan Telepon
- Efisiensi Belanja Tagihan Listrik

3.5. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

a. Penguatan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Terpadu (SPGDT)

Merupakan pengembangan sistem pelayanan kegawatdaruratan yang lebih responsif, cepat, tepat dengan penggunaan aplikasi yang menyajikan persebaran fasilitas kesehatan, ketersediaan tempat tidur RS, kompetensi RS, serta kasus gawat darurat. *Respond time* pelayanan kegawatdaruratan salah satunya didukung dengan ketersediaan ambulans. Saat ini Dinkes DIY telah melakukan pengumpulan data ambulans baik yang berasal dari fasyankes (RS, Puskesmas, Klinik), PSC 119 di wilayah DIY, PMI, maupun ambulans masyarakat. Data ambulans ini telah dipetakan sesuai dengan lokasinya masing-masing untuk mendukung *respond time* dari pelayanan gawat darurat. Selanjutnya direncanakan pada tahun 2026 posisi ambulans ini dapat ditambahkan di dalam aplikasi SPGDT dan selanjutnya akan dapat dipantau posisinya sehingga rumah sakit penerima rujukan dapat mempersiapkan lebih awal rujukan pasien.

b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Dinas Kesehatan DIY memiliki aplikasi <https://kesgadiy.web.id/> yang digunakan dalam pelaporan capaian pelayanan kesehatan keluarga. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis *website* yang dapat diakses oleh publik. Data hasil capaian yang tercantum pada aplikasi, diinput oleh petugas puskesmas maupun dinas kesehatan. Menu yang terdapat di dalam webkesga dan dapat diakses oleh khalayak umum adalah melihat data. Masyarakat dapat memilih data yang diperlukan dengan memilih menu lihat data yang ada di beranda, kemudian dapat memilih data apa saja yang diperlukan baik itu dari sisi tahun, metode tampilan (per kabupaten/per puskesmas/per desa), denominator yang dibutuhkan lalu memilih indikator apa saja yang akan dicari.

c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak (SIMKIA) adalah aplikasi berbasis *website* yang dikembangkan Dinas Kesehatan DIY untuk memudahkan pengelolaan data. Informasi yang ada dalam SIMKIA ini hampir sama dengan kohort ibu dan balita. Aplikasi SIMKIA dapat diakses melalui <https://simundu.jogjaprovo.go.id/kartini/login.php>, untuk mengakses data bisa *login* menggunakan akun yang sudah terdaftar. Akun yang terdaftar terdiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi, Puskesmas, Bidan Praktik Mandiri, dan Rumah Sakit. Data yang di entri adalah data pelayanan kesehatan ibu, data

pelayanan bayi baru lahir dan data pelayanan usia produktif. Petugas dari puskesmas/bidan praktik mandiri/rumah sakit akan memasukkan data ke dalam aplikasi SIMKIA, kemudian data tersebut akan menjadi data agregat yang dapat diakses oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi untuk di analisis.

d. *Mobile Screening* (Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah)

Aplikasi berbasis android, yang berfungsi menggantikan kegiatan penjaringan kesehatan yang sebelumnya dilakukan secara manual oleh tenaga kesehatan, tergantikan dengan aplikasi yang dapat dilakukan secara mandiri oleh orang tua/siswa sehingga lebih cepat. Penghitungan penilaian dan rekapitulasi langsung otomatis dihitung melalui aplikasi dan masuk ke laman penjarkes <https://penjarkes.jogjaprovo.go.id>

e. Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan “*One Student One Family*” (OSOF)

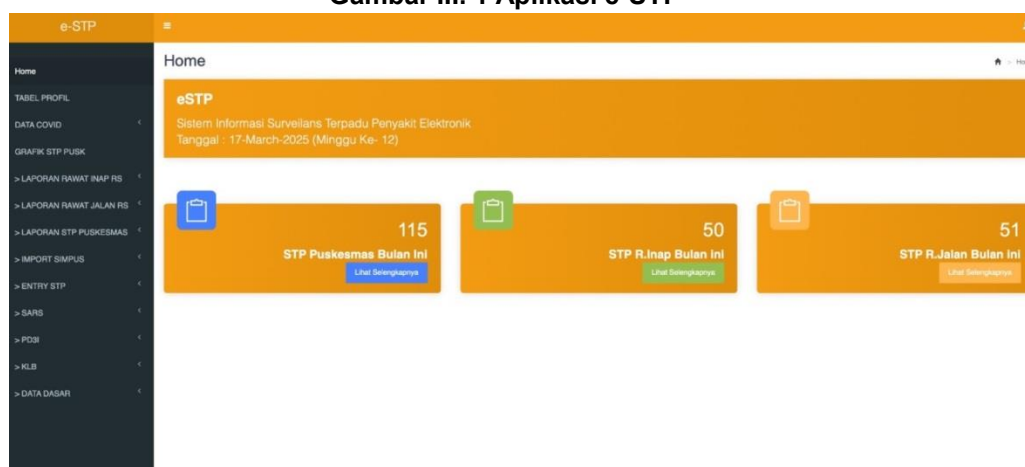
“*One Student One Family*” (OSOF) merupakan kegiatan berupa pendampingan mahasiswa yang melaksanakan magang, praktik kerja lapangan maupun Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK), pada tahap intervensi lanjut PISPK, di mana mahasiswa melakukan pendampingan terhadap keluarga sesuai dengan permasalahan dalam keluarga berdasarkan 12 indikator PISPK, antara lain: 1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB); 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; 3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap; 4) Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; 5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan; 6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar; 7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur; 8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan; 9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok; 10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan 12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Aplikasi e-STP (elektronik Surveilans Terpadu Penyakit) merupakan sistem informasi berbasis *online* untuk surveilans penyakit menular dan tidak menular yang dikembangkan secara mandiri oleh Dinas Kesehatan DIY. Aplikasi ini berfungsi sebagai pencatatan dan pelaporan surveilans penyakit menular dan

tidak menular yang dilaporkan bulanan oleh puskesmas dan rumah sakit. Aplikasi ini dapat memenuhi kebutuhan pencatatan dan pelaporan semua data surveilans yang dibutuhkan terutama untuk kewaspadaan dini, respons cepat maupun digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan program. Data penyakit menular maupun tidak menular yang dilaporkan dalam sistem informasi e-STP ini berupa data agregat dan difungsikan sebagai kewaspadaan dini dan respons cepat di lapangan. Penyakit menular potensial KLB /wabah diantaranya adalah PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi).

Gambar III. 1 Aplikasi e-STP



Sumber : <https://estp.jogjaprov.go.id/new/login.php>

3.6. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Dinas Kesehatan DIY sebagaimana *cascading* kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Dinas Kesehatan DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan di tengah kondisi Refocusing dan realokasi anggaran. Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Kesehatan DIY adalah sebagai berikut :

Tabel III. 15 Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Kesehatan DIY

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
1.	Sosialisasi penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana/ berpotensi bencana	Dinas Kesehatan Kab/Kota	Mengkoordinasikan tenaga kesehatan untuk kesiapsiagaan bencana, menyediakan data kesehatan terkait dampak bencana, memastikan ketersediaan <i>disaster plan</i> di fasyankes.	583 orang	Masyarakat DIY	Bagi OPD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Provinsi 2. Mempersiapkan mitigasi krisis kesehatan akibat bencana / berpotensi bencana Bagi Kelompok Sasaran: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminimalisir kejadian krisis kesehatan akibat bencana 2. Menyiapkan diri dalam kondisi bencana
		BPBD	Mengidentifikasi wilayah berpotensi bencana, berkontribusi pada penyusunan rencana kontingensi, menyediakan pelatihan kesiapsiagaan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat			
		Dunia usaha/ CSR	Menyediakan bantuan sarana prasarana kesiapsiagaan menghadapi krisis kesehatan			
		LSM / Komunitas	Turut memberikan edukasi dan sosialisasi kesiapsiagaan kepada masyarakat			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		Masyarakat	Mengikuti sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana dan berperan aktif dalam mitigasi bencana di lingkungannya			
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinas Kesehatan Kab/Kota	Deteksi dini dan investigasi terhadap potensi KLB, menyiapkan tenaga kesehatan, melakukan koordinasi dengan fasyankes dalam penanganan kasus berpotensi KLB	157490 orang	Masyarakat DIY	Bagi OPD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Provinsi 2. Mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Bagi Kelompok Sasaran: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminimalisir KLB 2. Antisipasi dalam menghadapi KLB
		Fasyankes	Memberikan pelayanan kepada masyarakat berpotensi KLB / terdampak, melaporkan kejadian berpotensi KLB pada Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR), melaksanakan surveilans epidemiologi untuk pemantauan penyebaran penyakit			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Melakukan pengawasan keamanan pangan, pengendalian vektor penyakit, edukasi petani/peternak, surveilans dan pengendalian zoonosis, melakukan vaksinasi dan kontrol kesehatan hewan ternak, pengawasan produk hewan.			
		LSM / Komunitas	Mendukung edukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanganan penyakit penyebab KLB			
		Masyarakat	Berpartisipasi dalam sosialisasi dan menerapkan langkah pencegahan KLB, melaporkan jika ada kasus yang berpotensi menjadi KLB, mematuhi protokol kesehatan dan anjuran dari pemerintah			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
3.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal untuk menurunkan prevalensi <i>underweight</i> pada balita	Dinas Kesehatan Kab/Kota	Mengidentifikasi dan mendata balita dengan berat badan kurang yang menjadi sasaran PMT, mendistribusi PMT lokal kepada kelompok sasaran, melakukan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat PMT, melaporkan hasil intervensi PMT kepada Dinas Kesehatan DIY	1 dokumen	Balita dengan berat badan kurang	Bagi OPD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian penurunan prevalensi <i>underweight</i> pada balita 2. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Diskes DIY Bagi Kelompok Sasaran: <ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan status gizi balita 4. Kesehatan balita meningkat
		Puskesmas dan posyandu	Melaksanakan pemberian PMT sesuai pedoman, memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pola makan sehat dan pemantauan tumbuh kembang anak, melaporkan hasil intervensi PMT ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.			
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Mendorong produksi bahan pangan berkualitas			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		Tim penggerak PKK	Mengedukasi ibu-ibu di desa tentang pentingnya gizi seimbang untuk anak, membantu dalam pelaksanaan dan distribusi PMT di Posyandu.			
		LSM/Komunitas	Pendampingan masyarakat			
4.	Imunisasi massal Polio dan <i>Japanese Encephalitis</i> (JE)	Dinas Kesehatan Kab/Kota	Mengimplementasikan program imunisasi di tingkat kabupaten/kota, Distribusi vaksin dan penyediaan tenaga kesehatan	2 dokumen	Vaksinasi polio: anak usia 0-7 tahun Vaksinasi JE: anak usia 9 bulan – kurang dari 15 tahun	Bagi OPD: 1. Mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) Bagi Kelompok Sasaran: 1. Meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat 2. Melindungi anak-anak dari
		Kementerian Agama	Edukasi vaksinasi pada kelompok tertentu			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		Dinas Pendidikan	Membantu mendata dan mengoordinasikan sasaran imunisasi di sekolah-sekolah, memfasilitasi pelaksanaan imunisasi massal di sekolah-sekolah (PAUD, TK, SD, SMP), mendorong partisipasi aktif guru dan orang tua dalam mendukung program imunisasi.			resiko penyakit Polio dan JE
		LSM	Sosialisasi vaksinasi dan memfasilitasi jangkauan imunisasi bagi kelompok rentan, seperti anak-anak dari keluarga miskin dan anak berkebutuhan khusus.			
		Dinas Kominfo	Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang imunisasi melalui media sosial, membantu menangkal hoaks dan misinformasi terkait imunisasi.			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		TNI/POLRI	Membantu pengamanan selama pelaksanaan imunisasi massal di berbagai lokasi, mendukung mobilisasi sasaran imunisasi di daerah sulit dijangkau.			
		Ormas Keagamaan (NU, Muhammadiyah, FKUB, MUI, dll)	Membantu sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi, mengedukasi masyarakat agar tidak termakan hoaks terkait imunisasi, mengadvokasi kepada tokoh agama dan masyarakat untuk mendukung imunisasi.			
		Tim Penggerak PKK	Mengajak ibu-ibu untuk membawa anak-anaknya ke Posyandu atau fasilitas kesehatan untuk imunisasi, membantu mendata anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi, mengedukasi masyarakat tentang manfaat imunisasi dan pencegahan penyakit menular.			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		Akademisi	Memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti ilmiah, mendukung pelaksanaan imunisasi dengan tenaga kesehatan sukarelawan atau mahasiswa			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
5.	Surat Keputusan Gubernur DIY tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru	Biro Hukum Setda	Melakukan kajian hukum terhadap rancangan/ <i>draft</i> SK Gubernur yang diajukan Diskes DIY, memastikan regulasi yang dibuat selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menyelaraskan tugas dan kewenangan lintas sektor dalam Tim Koordinasi.	1 dokumen	Masyarakat DIY	
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Mendukung pembentukan tim, memberi masukan atas kewenangan lintas sektor, bertanggung jawab dalam pengawasan kesehatan hewan yang berpotensi menularkan penyakit zoonosis, mengawasi rantai distribusi hewan dan produk hewan untuk mencegah penyebaran zoonosis, melakukan surveilans dan pemeriksaan terhadap ternak, unggas, dan satwa liar.			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		Dinas Lingkungan Hidup	Mendukung pembentukan tim, memberi masukan atas kewenangan lintas sektor, mengawasi aspek lingkungan yang berpotensi meningkatkan risiko penyebaran zoonosis (misalnya habitat vektor seperti nyamuk, tikus, kelelawar, dll.), mengoordinasikan upaya pengelolaan limbah medis dan limbah peternakan agar tidak menjadi sumber penyebaran penyakit, mengintegrasikan aspek lingkungan dalam strategi pengendalian zoonosis.			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		Balai Besar Veteriner Wates (BBVet Wates)	Mendukung pembentukan tim, memberi masukan atas kewenangan lintas sektor, melakukan penelitian dan uji laboratorium terhadap penyakit zoonosis pada hewan, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian dalam investigasi wabah yang diduga berasal dari hewan, memberikan rekomendasi teknis terkait pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis.			
		Akademisi	Mendukung pembentukan tim, memberi masukan atas kewenangan lintas sektor, melakukan riset ilmiah tentang pola penyebaran zoonosis dan penyakit infeksius baru, memberikan masukan berbasis bukti ilmiah untuk kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit,			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta dan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta	Mendukung pembentukan tim, memberi masukan atas kewenangan lintas sektor, melakukan pengujian laboratorium untuk mendeteksi patogen penyebab zoonosis dan penyakit infeksius baru, melakukan kajian risiko terhadap lingkungan yang berpotensi menjadi sumber penyakit zoonosis, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DIY dalam investigasi wabah.			
		Organisasi profesi	Mendukung pembentukan tim, memberi masukan atas kewenangan lintas sektor, melakukan advokasi terhadap peningkatan kapasitas tenaga medis dan tenaga veteriner dalam menangani zoonosis, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan dan seminar ilmiah terkait zoonosis dan penyakit infeksius baru.			

BAB IV Penutup

Bab IV berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Langkah Perbaikan Kinerja*

4.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Kesehatan DIY tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai

berikut:

Tujuan Dinas Kesehatan DIY pada tahun 2024 adalah Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Pada Balita telah tercapai bahkan melampaui target (108,03%). Terdapat 2 sasaran yang ada, yaitu “Terwujudnya Keluarga Sehat” dan “Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah”. Kedua sasaran tersebut capaiannya juga melampaui target.

1. Hambatan permasalahan kinerja (dapat diidentifikasi dari faktor *man, money, material, method, machine*; faktor proses manajemen: *planning, organizing, actuating, controlling*; faktor *stakeholder* eksternal atau faktor proses bisnis yang ada selama ini berjalan.

a. Faktor *man*

Berdasarkan data SDM Dinas Kesehatan dan UPT, jumlah seluruh pegawai Dinas Kesehatan dan UPT sebanyak 614 orang. Tingkat pendidikan didominasi S1/DIV sebanyak 256 orang (41,63%), disusul jenjang D3 sebanyak 214 orang (34,80%), jenjang S2 sebanyak 116 orang (18,86%), jenjang SMA sebanyak 26 orang (4,23%), dan paling sedikit jenjang SMP dengan jumlah 3 orang (0,49%). Komposisi pegawai perempuan lebih mendominasi dengan jumlah 421 orang

(68,46%) dibandingkan jumlah pegawai laki-laki sebesar 194 orang (31,54%). Masih terdapat kekurangan SDM yang sesuai kualifikasi untuk mengisi formasi yang tersedia.

b. Faktor *money*

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Pada tahun 2024 Anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp 304.501.252.292,00 dan terealisasi Rp 263.710.832.509 (86,60%) dengan realisasi fisik 100%.

c. Faktor Material

Untuk mendukung operasional kegiatan Dinas Kesehatan dan UPT memiliki Kendaraan dinas terdiri dari yakni 6 (enam) unit kendaraan dinas jabatan, 36 (tiga puluh enam) unit kendaraan operasional, 1 (satu) unit bus, 6 (enam) unit kendaraan khusus (ambulans) 2 (unit) kendaraan khusus (mobil jenazah) dan 41 (empat puluh satu) unit kendaraan roda dua. Ruangan kantor umum meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang aula, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi dan toilet telah tersedia. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, *filling cabinet*, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lainnya sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio *personal computer* atau *laptop* dibandingkan dengan jumlah pegawai mendekati rasio 1:1. Dengan demikian ketersediaan sarana prasarana sudah memadai.

d. Faktor *Method*

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Kesehatan DIY telah berkomitmen memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemda DIY. Skema kinerja dilaksanakan melalui hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi.

e. Faktor *Machine*

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Kesehatan DIY telah memanfaatkan berbagai sistem informasi kesehatan. Namun, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi. Dinas Kesehatan DIY telah mengadopsi berbagai sistem informasi kesehatan, baik yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan maupun yang dikembangkan secara mandiri. Integrasi antar sistem masih menjadi tantangan, mengingat beberapa aplikasi belum saling terhubung secara optimal, menyebabkan duplikasi pencatatan dan meningkatkan beban kerja tenaga kesehatan. Selain itu, pemanfaatan teknologi big data dan analisis spasial (GIS) belum sepenuhnya maksimal dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi dan integrasi sistem informasi, dan penguatan infrastruktur digital. Dengan melakukan perbaikan-perbaikan pada aspek machine ini, diharapkan Dinas Kesehatan DIY dapat lebih efektif dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung program-program kesehatan secara optimal.

f. Faktor proses manajemen

1) *Planning*

Proses perencanaan program dan anggaran Dinas Kesehatan DIY melalui proses dan tahapan berikut ini:

- a) Sinkronisasi dokumen Renstra, Renja, dan DPA
- b) Penyusunan Perjanjian Kinerja (SKP)
- c) Sinkronisasi kinerja bawahan dengan kinerja atasan
- d) *Refocusing*, pergeseran, perubahan APBD
- e) Keterlibatan pimpinan dalam siklus SAKIP

2) *Organizing*

Dalam pelaksanaan program kegiatan, anggaran, dan pelayanan kepada masyarakat Dinas Kesehatan berpedoman pada regulasi dan perencanaan yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis (renstra).

3) *Actuating*

Dalam pelaksanaan program kegiatan, Dinas Kesehatan DIY didukung kepemimpinan yang efektif, adanya motivasi kerja, koordinasi dan komunikasi melalui rapat rutin bulanan untuk membahas aktivitas harian dan kegiatan program.

4) *Controlling*

Evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan dilakukan dengan cara:

- a) Menindaklanjuti Rekomendasi LHE SAKIP yang diterbitkan Inspektorat
- b) Pemantauan pengendalian pelaksanaan kegiatan termasuk kegiatan inovasi

- c) Koordinasi dan monitoring evaluasi internal penyiapan data kinerja untuk *desk Monitoring* evaluasi timbal balik rapat koordinasi pengendalian (Rakordal) triwulan oleh Bappeda dengan pendekatan *Balance Score Card* (BSC)
 - d) Tindak lanjut hasil Rakordal untuk perbaikan kinerja organisasi dan kinerja individu, dapat dilakukan melalui pembinaan
- 5) Faktor *stakeholder* eksternal atau faktor proses bisnis
- Reviu Peta Proses Bisnis dilakukan Dinas Kesehatan DIY untuk menyelaraskan/menyesuaikan dengan regulasi dan renstra terkini.
2. Faktor kunci keberhasilan
- a. Adanya pembinaan secara berkala melalui *briefing* dan rapat eselon yang dilakukan pimpinan serta memberikan arahan, masukan, ide gagasan inovatif untuk percepatan pelayanan dan pelaksanaan program kegiatan.
 - b. Memperkuat koordinasi dan sinergitas dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan jejaring *pentahelix* dalam melaksanakan program kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui rapat/pertemuan untuk membahas ketercapaian rencana aksi dan melakukan upaya perbaikan secara berjenjang dan melalui kunjungan lapangan untuk melakukan pemantauan pengendalian secara langsung.

4.2. Langkah Perbaikan Kinerja

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Mengawal pencapaian *output* organisasi dengan pemantauan dan pengendalian secara umum maupun khusus pada unit kerja yang berisiko tinggi tidak tercapai.
2. Mengawal pencapaian *outcome* dan IKU organisasi dengan pemantauan dan pengendalian secara umum maupun khusus pada unit kerja yang berisiko tinggi tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.
3. Memperbaiki pengumpulan data, manajemen data, perencanaan, penganggaran dan capaian, baik secara manual maupun penggunaan aplikasi agar program kegiatan terlaksana secara efektif dan efisien.
4. Memperbaiki manajemen evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan perencanaan dan penganggaran kegiatan dengan mengimplementasikan SOP yang telah disusun

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Pada Balita	11,9	11,7	11,5	11,3	11,2

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya keluarga sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,33	0,36	0,39	0,42	0,45
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A	A	A	A

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan sub kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat	
			Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		214.742.253.288		189.443.152.186		109.402.523.044		374.720.045.646		324.995.253.119		1.297.181.999.525	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	52,67%	735.503.000	55,73%	838.163.000	59,54%	885.979.000	63,35%	937.577.000	67,18%	998.335.000	67,18%	4.695.870.500

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan sub kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat	
			Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi	65,60%	13.090.600	84,40%	134.423.000	86,10%	149.987.000	87,70%	162.551.000	90,20%	181.485.000	90,20%	687.297.800
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	n/a	0,00%	100,00 %	524.345.000	100,00 %	576.779.500	100,00 %	634.457.500	100,00 %	697.903.000	100,00 %	2.433.485.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan sub kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat	
			Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang	n/a	0,00%	0,35%	19.33.695.000	0,95%	28.587.383.000	2,11%	19.693.730.000	6,30%	116.139.657.900	6,30%	183.757.465.900

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan sub kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat	
			Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase kab/kota memiliki kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	20,00%	389.855.000	20,00%	420.350.000	40,00%	2.740.786.000	40,00%	1.014.864.000	60,00%	1.100.000.000	60,00%	6.198.221.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan sub kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat	
			Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,91%	151.131.048.671	89,06%	158.033.778.677	89,21%	240.433.854.971	89,36%	209.157.325.893	89,51%	185.803.442.701	89,51%	1.105.709.111.006

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2024



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS KESEHATAN

Disdikbud

Jalan Gondosuli No. 6 telepon (0274) 563153 faksimile (0274) 512368
Website : dinkes.jogjaprovo.go.id, Email : dinkes@jogjaprovo.go.id
YOGYAKARTA 55165

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, terkait adanya pentapan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes.
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 24 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN DIY,

drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes.
NIP. 198509121993032006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TUJUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan DIY
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan DIY

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Pada Balita	%	11,7	Triwulan I	12,0
					Triwulan II	11,9
					Triwulan III	11,8
					Triwulan IV	11,7

Perjanjian Kinerja Perubahan Sasaran

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan DIY
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,360	Triwulan I	0,345
					Triwulan II	0,350
					Triwulan III	0,355
					Triwulan IV	0,360
2.	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori	A (92,75)	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A (92,75*)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (APBD, DAK NF, DID, DBH CHT, Pajak Rokok)	Rp 8.750.389.899
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (APBD, DAK NF, Pajak Rokok)	Rp 341.839.400
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman (APBD, Pajak Rokok)	Rp 24.308.800
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Pajak Rokok)	Rp 57.430.000

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran
5.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dais)	Rp 395.000.000
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 32.360.149.241
	Jumlah Anggaran	Rp 41.929.117.340

2. Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis (Balai Laboratorium dan Kalibrasi):

No	Program	Anggaran
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (APBD, DBH CHT)	Rp 350.286.600
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD & BLUD)	Rp 15.043.505.839
	Jumlah Anggaran	Rp 15.393.792.439

3. Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis (Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial):

No	Program	Anggaran
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)	Rp 47.452.761.614
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 902.945.400
	Jumlah Anggaran	Rp 48.355.707.014

4. Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis (Balai Pelatihan Kesehatan):

No	Program	Anggaran
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Pajak Rokok)	Rp 165.518.200
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD & BLUD)	Rp 10.980.017.928
	Jumlah Anggaran	Rp 11.145.536.128

5. Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis (Rumah Sakit Jiwa Ghrasia):

No	Program	Anggaran
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (DAK)	Rp 1.503.000.000

No	Program	Anggaran
	Fisik)	
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (Dais)	Rp 18.759.198.512
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD & BLUD)	Rp 81.962.097.357
	Jumlah Anggaran	Rp 102.224.295.869

6. Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis (Rumah Sakit Paru Respira):

No	Program	Anggaran
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (APBD, DAK Fisik, DAU, DBH CHT)	Rp 27.169.450.000
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD, DAU & BLUD)	Rp 51.160.698.102
	Jumlah Anggaran	Rp 78.330.148.102

7. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

8. Mengelola anggaran dekonsentrasi Program Kesehatan Masyarakat, Program Pelayanan Kesehatan dan JKN, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Program Dukungan Manajemen Rp 4.836.457.000

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Yogyakarta, 14 Oktober 2024,
PIHAK PERTAMA
KETALA DINAS KESEHATAN DIY,

drg. PENBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes.
NIP. 196509121993032006

Lampiran 3. Evaluasi AKIP Tahun 2023



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta Telp: (0274) 562009 Fax: (0274) 512567
Website: <http://inspektorat.jogjapro.go.id> e-mail: inspektorat@jogjapro.go.id Kode Pos 55166

Yogyakarta, 26-3-2024

Nomor : 700 / 489
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Perangkat
Daerah pada Dinas Kesehatan
DIY Tahun 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Daerah Istimewa Yogyakarta
di -
Yogyakarta

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan DIY Tahun 2023, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 432/KEP/2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024;

g. Surat ...

- g. Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor 061/III/INSP/2024 tentang Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan DIY.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Sasaran Evaluasi

Sasaran evaluasi adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2023.

5. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

6. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

7. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- c. penyelenggaraan pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan, dan pengendalian penyakit;
- d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan kesehatan khusus, standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. penyelenggaraan kesehatan masyarakat;
- f. pengelolaan sumber daya manusia kesehatan;
- g. pengelolaan kefarmasian dan alat kesehatan;
- h. pengembangan upaya kesehatan tradisional;
- i. pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan kesehatan kabupaten/kota;
- j. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan kesehatan;
- k. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- l. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- m. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
- n. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
- o. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Dinas;
- p. pengelolaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- q. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- r. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas..

Susunan organisasi Dinas Kesehatan DIY terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum;
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; dan
 - 2) Seksi Pengendalian Penyakit.

- d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Kesehatan Khusus; dan
 - 2) Seksi Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- e. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi, dan Kesehatan Jiwa; dan
 - 2) Seksi Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
 - 2) Seksi Farmasi, Makanan, Minuman, dan Alat Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Unit Organisasi Bersifat Khusus; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan DIY dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Dinas Kesehatan DIY telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Dinas Kesehatan DIY telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut.
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Dinas Kesehatan DIY telah menggunakan Aplikasi Sengguh dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi ASN Memayu sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu.

Inovasi lain dalam peningkatan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan DIY yaitu:

- Penguatan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Terpadu (SPGDT) merupakan pengembangan sistem pelayanan kegawatdaruratan yang lebih responsif, cepat, tepat dengan

penggunaan...

penggunaan aplikasi yang menyajikan persebaran fasilitas kesehatan, ketersediaan tempat tidur RS, kompetensi RS, kasus gawat darurat serta data ambulans yang bisa diakses oleh masyarakat. Aplikasi *Ambulance Tracing System* adalah suatu aplikasi *mobile phone* yang dapat digunakan untuk mendukung layanan kegawatdaruratan medis, kegawatdaruratan maternal dan kehamilan serta kecelakaan lalu lintas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif. Dinas Kesehatan DIY memiliki aplikasi *kesgadiy* yang digunakan dalam pelaporan capaian pelayanan kesehatan keluarga. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis web dengan alamat <https://kesgadiy.web.id/> yang dapat diakses oleh publik. Data hasil capaian yang tercantum pada aplikasi, *dientrykan* oleh puskesmas maupun dinas kesehatan. Pada tahun 2023, dilakukan penambahan beberapa menu pada aplikasi, salah satunya penambahan menu *entry* capaian hasil pelayanan kesehatan usia produktif yaitu jumlah pasangan calon pengantin (catin) terdaftar di KUA atau lembaga lain, catin dilayani kesehatan reproduksi, catin perempuan dengan anemia, dan catin perempuan dengan kekurangan gizi.
- Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (GeMa CerMat). Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat yang dilaksanakan dengan upaya peningkatan pengetahuan, kesadaran, kepedulian, dan keterampilan masyarakat mengenai penggunaan obat secara rasional oleh *Agent of Change (AoC)* GeMa CerMat dan Kader GeMa CerMat.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak (SIMKIA) adalah aplikasi berbasis *website* yang dikembangkan Dinas Kesehatan DIY untuk memudahkan pengelolaan data. Informasi yang ada dalam SIMKIA ini hampir sama dengan kohort ibu dan balita. Aplikasi SIMKIA dapat diakses melalui www.simundu.jogjaprov.go.id/kartini, untuk mengakses data bisa *login* menggunakan akun yang sudah terdaftar. Akun yang terdaftar terdiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, puskesmas, Bidan Praktik Mandiri, dan Rumah Sakit.
- Gendhis Manis (Gerakan Hidup Sehat Melawan Diabetes Melitus) dilakukan melalui program pelayanan diabetes melitus secara komprehensif mulai dari deteksi dini sampai rehabilitatif, meningkatkan akses untuk pelayanan diabetes yang berkualitas & inklusif, dan edukasi melalui Kulwap (Kuliah *Whatsapp*).

• *Mobile...* 1

- *Mobile Screening* (Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah). Aplikasi berbasis android, yang berfungsi menggantikan kegiatan penjaringan kesehatan yang sebelumnya dilakukan secara manual oleh tenaga kesehatan, tergantikan dengan aplikasi yang dapat dilakukan secara mandiri oleh orang tua/siswa sehingga lebih cepat. Penghitungan penilaian dan rekapitulasi langsung otomatis dihitung melalui aplikasi dan masuk ke *website* penjarkes, yang dapat diakses melalui <https://penjarkes.jogjapro.go.id>.
- Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan "ONE STUDENT ONE FAMILY" (OSOF) merupakan kegiatan berupa pendampingan mahasiswa yang melaksanakan magang, praktik kerja lapangan maupun Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK), pada tahap intervensi lanjut PISPK, dimana mahasiswa melakukan pendampingan terhadap keluarga sesuai dengan permasalahan dalam keluarga berdasarkan 12 indikator PIS PK.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB). Aplikasi e-STP (elektronik Surveilans Terpadu Penyakit) merupakan sistem informasi berbasis *online* untuk surveilans penyakit menular dan tidak menular yang dikembangkan secara mandiri oleh Dinas Kesehatan DIY. Aplikasi ini berfungsi sebagai pencatatan dan pelaporan surveilans penyakit menular dan tidak menular yang dilaporkan bulanan oleh puskesmas dan rumah sakit.

9. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Dinas Kesehatan DIY telah menindaklanjuti dengan:

- a. Meningkatkan peran serta seluruh pegawai Dinas Kesehatan DIY agar memahami dan lebih peduli atas hasil pengukuran kinerja, sehingga pada aspek pengukuran kinerja, khususnya yang terkait dengan peran serta segenap pegawai Dinas Kesehatan DIY untuk memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dapat dipertahankan nilainya pada kesempatan mendatang, bahkan dapat lebih ditingkatkan;
- b. Meningkatkan koordinasi internal dan koordinasi lintas sektor sehingga capaian sasaran/kinerja organisasi menjadi lebih baik.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Kesehatan DIY

memperoleh... 51

memperoleh nilai sebesar 89,72 Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27,68 atau 92,30% dari bobot sebesar 30%;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,60 atau 82,00% dari bobot sebesar 30%;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 14,02 atau 93,5% dari bobot sebesar 15%;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 23,42 atau 93,67% dari bobot sebesar 25%.

2. Rekomendasi


Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan DIY agar:

- a. Meningkatkan pengendalian internal dalam rangka pencapaian kinerja tidak hanya pada level output yang sudah tercapai, namun diharapkan juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian khususnya pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan diharapkan dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY yaitu Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat.
- b. Menyosialisasikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah kepada seluruh pegawai Dinas Kesehatan DIY dan UPT-nya agar mengetahui dan memahami kriteria yang harus dipenuhi untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Meningkatkan koordinasi internal dan koordinasi lintas sektor sehingga capaian sasaran/kinerja organisasi dan konsistensi data capaian sasaran / kinerja organisasi dapat menjadi lebih baik.

C. PENUTUPAN

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan DIY memperoleh nilai 89,72. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

2. Penguatan... 

2. Penguatan AKIP Perangkat Daerah

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kesehatan DIY diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Kesehatan DIY secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT
MUHAMMAD SETIADI, S.Pt., M.Acc.
NIP. 19671004 199203 1 005

Tembusan:
Kepala Dinas Kesehatan DIY

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2023



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS KESEHATAN

Wisekama Mangunharjo

Jalan Gondosuli No. 6 telepon (0274) 563153 faksimile (0274) 512368
Website : dinkes.jogjaprov.go.id, Email : dinkes@jogjaprov.go.id
Y O G Y A K A R T A 55165

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKIP TAHUN 2024 DINAS KESEHATAN DIY

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
<p>Surat Inspektur DIY tanggal 21 April 2024, Nomor 700/489 perihal Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan DIY tahun 2023 dengan rekomendasi :</p> <p>a. Meningkatkan pengendalian internal dalam rangka pencapaian kinerja tidak hanya pada level output yang sudah tercapai, namun diharapkan juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian khususnya pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program peningkatan Kapasitas SDM, Program sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan diharapkan dapat membantu mewujudkan tercapainya sasaran Pemerintah Daerah DIY yaitu Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat.</p> <p>b. Menyosialisasikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah kepada seluruh pegawai Dinkes DIY dan UPT-nya agar mengetahui dan memahami kriteria yang harus dipenuhi untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>c. Meningkatkan koordinasi internal dan koordinasi lintas sektor sehingga capaian sasaran/kinerja organisasi dan</p>	<p>Upaya yang dilakukan dalam rangka implementasi Sistem AKIP Dinas Kesehatan DIY adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Mengoptimalkan pengendalian dengan meningkatkan pemahaman serta kepedulian segenap pegawai Dinas Kesehatan DIY untuk bersama-sama berupaya meningkatkan hasil pengukuran kinerja melalui berbagai langkah internalisasi sehingga dapat membantu mewujudkan tercapainya sasaran Pemerintah Daerah DIY</p> <p>b. Melakukan sosialisasi secara intens kepada seluruh pegawai Dinas Kesehatan DIY dan UPT mengenai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah guna meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>c. Melakukan koordinasi dan evaluasi internal maupun lintas sektor lebih intens dalam mencapai sasaran</p>

Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
konsistensi data capaian sasaran/ kinerja organisasi dapat menjadi lebih baik.	organisasi


KEPALA DINAS KESEHATAN DIY





drg. Pembajan Setyaningastutie, M.Kes
NIP. 196509121993032006

Lampiran 5. Penghargaan yang diraih Dinas Kesehatan DIY Tahun 2024

NO	NAMA PENGHARGAAN	TGL/BLN/TAHUN PEMBERIAN PENGHARGAAN	SKALA (NASIONAL/ INTERNASIONAL)	TINGKATAN/ JUARA KE-	KETERANGAN (PENGHARGAAN DIBERIKAN TERKAIT APA)	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM/ PIALA
1.	Sertifikat Penghargaan Penyusunan Publikasi DIY 2024	20 Februari 2024	Badan Pusat Statistik Provinsi DIY		Kontribusi dalam penyusunan publikasi DIY Dalam Angka 2024	

NO	NAMA PENGHARGAAN	TGL/BLN/TAHUN PEMBERIAN PENGHARGAAN	SKALA (NASIONAL/ INTERNASIONAL)	TINGKATAN/ JUARA KE-	KETERANGAN (PENGHARGAAN DIBERIKAN TERKAIT APA)	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM/ PIALA
2.	Tanda Penghargaan dalam Melakukan Sosialisasi Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	20 Mei 2024	Kementerian Kesehatan		Sebagai Dinas Kesehatan yang Paling Aktif dan Konsisten Melakukan Sosialisasi Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	

NO	NAMA PENGHARGAAN	TGL/BLN/TAHUN PEMBERIAN PENGHARGAAN	SKALA (NASIONAL/ INTERNASIONAL)	TINGKATAN/ JUARA KE-	KETERANGAN (PENGHARGAAN DIBERIKAN TERKAIT APA)	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM/ PIALA
3.	Kemenkes RI memberikan Penghargaan Dinas Kesehatan DIY Peringkat 1 dalam Pengendalian Resistensi Antibiotik tahun 2023	31 Mei 2024	Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Peringkat I	Kemenkes RI memberikan Penghargaan Dinas Kesehatan DIY Peringkat 1 dalam Pengendalian Resistensi Antibiotik tahun 2023	 <p>Kemenkes</p> <p>DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN</p> <p>memberikan penghargaan kepada</p> <p>DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA</p> <p>artikagat</p> <p>Peringkat I Dinas Kesehatan Provinsi Terbaik dalam Pengendalian Resistensi Antibiotik Tahun 2023</p> <p>Jakarta, 31 Mei 2024</p> <p>DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN</p> <p>Dr. Candra Andalusia, Apt., M.Pharm., MARB.</p>

NO	NAMA PENGHARGAAN	TGL/BLN/TAHUN PEMBERIAN PENGHARGAAN	SKALA (NASIONAL/ INTERNASIONAL)	TINGKATAN/ JUARA KE-	KETERANGAN (PENGHARGAAN DIBERIKAN TERKAIT APA)	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM/ PIALA
4.	Kemenkes RI memberikan penghargaan Dinas Kesehatan DIY atas Dukungan dan Kontribusi dalam Pelaksanaan Pilot Project Perluasan <i>Smile</i> ATM Tahun 2023	31 Mei 2024	Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan		Kemenkes RI memberikan penghargaan Dinas Kesehatan DIY atas Dukungan dan Kontribusi dalam Pelaksanaan Pilot Project Perluasan <i>Smile</i> ATM Tahun 2023	


NO	NAMA PENGHARGAAN	TGL/BLN/TAHUN PEMBERIAN PENGHARGAAN	SKALA (NASIONAL/ INTERNASIONAL)	TINGKATAN/ JUARA KE-	KETERANGAN (PENGHARGAAN DIBERIKAN TERKAIT APA)	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM/ PIALA
5.	Kemkes RI memberikan penghargaan kepada Dinas Kesehatan DIY atas 100% <i>Risk Mapping and Recommendation for Emerging Infectious Diseases</i>	Juni 2024	Subdit Penyakit Infeksi <i>Emerging</i> Kemkes		Pemetaan Risiko Penyakit Infeksi <i>Emerging</i> dan Rekomendasi	

NO	NAMA PENGHARGAAN	TGL/BLN/TAHUN PEMBERIAN PENGHARGAAN	SKALA (NASIONAL/ INTERNASIONAL)	TINGKATAN/ JUARA KE-	KETERANGAN (PENGHARGAAN DIBERIKAN TERKAIT APA)	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM/ PIALA
6.	<i>Universal Health Coverage</i>	8 Agustus 2024	Menteri Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI		Satu Dekade Program JKN-KIS Untuk Negeri Sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Kesehatan Bagi Masyarakat Indonesia	

NO	NAMA PENGHARGAAN	TGL/BLN/TAHUN PEMBERIAN PENGHARGAAN	SKALA (NASIONAL/ INTERNASIONAL)	TINGKATAN/ JUARA KE-	KETERANGAN (PENGHARGAAN DIBERIKAN TERKAIT APA)	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM/ PIALA
7.	Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Pemerintah Daerah dengan Dukungan APBD Untuk Perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan Tahun 2024	29 Agustus 2024	Direktorat Jendral Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan		Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Pemerintah Daerah dengan Dukungan APBD Untuk Perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan Tahun 2024	

NO	NAMA PENGHARGAAN	TGL/BLN/TAHUN PEMBERIAN PENGHARGAAN	SKALA (NASIONAL/INTERNASIONAL)	TINGKATAN/ JUARA KE-	KETERANGAN (PENGHARGAAN DIBERIKAN TERKAIT APA)	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM/ PIALA
8.	Sertifikat Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY atas keberhasilan mencapai target Non-Polio AFP (NPAFP) Rate ≥ 3 per 100.000 penduduk <15 Tahun dan <i>Discarded</i> (bukan campak – bukan rubela) <i>rate</i> ≥ 2 per 100.000 penduduk pada tahun 2023.	30 Agustus 2024	Direktur Pengelolaan Imunisasi		Sertifikat Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY atas keberhasilan mencapai target Non-Polio AFP (NPAFP) Rate ≥ 3 per 100.000 penduduk <15 Tahun dan <i>Discarded</i> (bukan campak – bukan rubela) <i>rate</i> ≥ 2 per 100.000 penduduk pada tahun 2023.	

NO	NAMA PENGHARGAAN	TGL/BLN/TAHUN PEMBERIAN PENGHARGAAN	SKALA (NASIONAL/ INTERNASIONAL)	TINGKATAN/ JUARA KE-	KETERANGAN (PENGHARGAAN DIBERIKAN TERKAIT APA)	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM/ PIALA
9.	Sertifikat Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY atas Keberhasilan Mendukung Tercapainya Target Pelaporan Kasus Suspek <i>Congenital Rubella Syndrome</i> (CRS) ≥ 1 per 10.000 Kelahiran Hidup Pada Tahun 2023 di RSUP Dr. Sadjito.	11 Oktober 2024	Direktur Pengelolaan Imunisasi		Sertifikat Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY atas Keberhasilan Mendukung Tercapainya Target Pelaporan Kasus Suspek <i>Congenital Rubella Syndrome</i> (CRS) ≥ 1 per 10.000 Kelahiran Hidup Pada Tahun 2023 di RSUP Dr. Sadjito.	

NO	NAMA PENGHARGAAN	TGL/BLN/TAHUN PEMBERIAN PENGHARGAAN	SKALA (NASIONAL/ INTERNASIONAL)	TINGKATAN/ JUARA KE-	KETERANGAN (PENGHARGAAN DIBERIKAN TERKAIT APA)	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM/ PIALA
10.	Direktur Pengelolaan Imunisasi memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Dinas Kesehatan DIY atas usaha dan kerja kerasnya mencapai target $\geq 95\%$ dalam PIN Polio Tahap 2 Putaran 1 dan 2.		Direktur Pengelolaan Imunisasi.		Direktur Pengelolaan Imunisasi memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Dinas Kesehatan DIY atas usaha dan kerja kerasnya mencapai target $\geq 95\%$ dalam PIN Polio Tahap 2 Putaran 1 dan 2.	

NO	NAMA PENGHARGAAN	TGL/BLN/TA HUN PEMBERIAN PENGHARGAAN	SKALA (NASIONAL/ INTERNASIONAL)	TINGKATAN/ JUARA KE-	KETERANGAN (PENGHARGAAN DIBERIKAN TERKAIT APA)	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM/ PIALA
11.	Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Peringkat III Kategori Provinsi dengan Persentase Tertinggi dalam penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik (RME) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Klinik, dan Praktik Mandiri.	7 November 2024	Menteri Kesehatan	III	Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Peringkat III Kategori Provinsi dengan Persentase Tertinggi dalam penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik (RME) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Klinik, dan Praktik Mandiri.	

NO	NAMA PENGHARGAAN	TGL/BLN/TAHUN PEMBERIAN PENGHARGAAN	SKALA (NASIONAL/ INTERNASIONAL)	TINGKATAN/ JUARA KE-	KETERANGAN (PENGHARGAAN DIBERIKAN TERKAIT APA)	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM/ PIALA
12.	Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Peringkat V Kategori Provinsi dengan Kepatuhan Penggunaan Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) Tertinggi Nasional 2024.	7 November 2024	Menteri Kesehatan	V	Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Peringkat V Kategori Provinsi dengan Kepatuhan Penggunaan Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) Tertinggi Nasional 2024	

NO	NAMA PENGHARGAAN	TGL/BLN/TAHUN PEMBERIAN PENGHARGAAN	SKALA (NASIONAL/ INTERNASIONAL)	TINGKATAN/ JUARA KE-	KETERANGAN (PENGHARGAAN DIBERIKAN TERKAIT APA)	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM/ PIALA
13.	Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Peringkat 2 Pemeringkatan Profil Kesehatan Tingkat Provinsi Tahun 2024.	7 November 2024	Menteri Kesehatan	II	Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Peringkat 2 Pemeringkatan Profil Kesehatan Tingkat Provinsi Tahun 2024.	

NO	NAMA PENGHARGAAN	TGL/BLN/TAHUN PEMBERIAN PENGHARGAAN	SKALA (NASIONAL/ INTERNASIONAL)	TINGKATAN/ JUARA KE-	KETERANGAN (PENGHARGAAN DIBERIKAN TERKAIT APA)	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM/ PIALA
14.	Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Peringkat 1 Dinas Kesehatan Provinsi dengan Implementasi SMILE ATM (AIDS,TB,MALARIA) Terbaik Tahun 2024.	7 November 2024	Menteri Kesehatan	I	Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Peringkat 1 Dinas Kesehatan Provinsi dengan Implementasi SMILE ATM (AIDS,TB,MALARIA) Terbaik Tahun 2024.	

NO	NAMA PENGHARGAAN	TGL/BLN/TAHUN PEMBERIAN PENGHARGAAN	SKALA (NASIONAL/ INTERNASIONAL)	TINGKATAN/ JUARA KE-	KETERANGAN (PENGHARGAAN DIBERIKAN TERKAIT APA)	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM/ PIALA
15.	Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Peringkat Terbaik I Dalam Pembinaan Pelaporan Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Melalui Aplikasi SIMONA Tahun 2024.	7 November 2024	Kementerian Kesehatan.	Terbaik I	Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Peringkat Terbaik I Dalam Pembinaan Pelaporan Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Melalui Aplikasi SIMONA Tahun 2024.	

NO	NAMA PENGHARGAAN	TGL/BLN/TA HUN PEMBERIAN PENGHARGAAN	SKALA (NASIONAL/ INTERNASIONAL)	TINGKATAN/ JUARA KE-	KETERANGAN (PENGHARGAAN DIBERIKAN TERKAIT APA)	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM/ PIALA
16.	Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Provinsi dengan Akselerasi Transformasi Digital Terbaik.	7 November 2024	Kementerian Kesehatan		Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Provinsi dengan Akselerasi Transformasi Digital Terbaik.	

NO	NAMA PENGHARGAAN	TGL/BLN/TAHUN PEMBERIAN PENGHARGAAN	SKALA (NASIONAL/ INTERNASIONAL)	TINGKATAN/ JUARA KE-	KETERANGAN (PENGHARGAAN DIBERIKAN TERKAIT APA)	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM/ PIALA
17.	Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Peringkat II Instansi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan Terbaik Kategori Dinas Kesehatan Provinsi.	7 November 2024.	Menteri Kesehatan	II	Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Peringkat II Instansi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan Terbaik Kategori Dinas Kesehatan Provinsi.	 <p>The image shows a certificate of appreciation (Tanda Penghargaan) from the Indonesian Ministry of Health (KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA). The certificate is awarded to the Yogyakarta Provincial Health Office (Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) for being the 2nd Best Functional Health Category (Peringkat II) of Provincial Health Offices (Instansi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan Terbaik Kategori Dinas Kesehatan Provinsi) in 2024. The certificate is signed by the Minister of Health and is dated November 7, 2024.</p>

NO	NAMA PENGHARGAAN	TGL/BLN/TAHUN PEMBERIAN PENGHARGAAN	SKALA (NASIONAL/ INTERNASIONAL)	TINGKATAN/ JUARA KE-	KETERANGAN (PENGHARGAAN DIBERIKAN TERKAIT APA)	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM/ PIALA
18.	Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024	14 November 2024	Ombudsman RI		Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024	 <p>The image shows a certificate from the Ombudsman of the Republic of Indonesia. It is titled 'PIAGAM PENGHARGAAN' and is for the 'PENGANUGERAHAN PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK) TAHUN 2024'. It is awarded to 'DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA'. The certificate includes a score of 96,32 and a 'KUALITAS TERTINGGI' (Highest Quality) seal. It is signed by Muhammad Rofi, S.H., M.Hum., Ph.D. on November 14, 2024.</p>
19.	Penghargaan atas pencapaian Dinas Kesehatan Provinsi sebagai Provinsi Terbaik 1 dalam Pelaksanaan Program TBC Tahun 2024	2 Desember 2024	Kementerian Kesehatan	Terbaik I	Penghargaan atas pencapaian Dinas Kesehatan Provinsi sebagai Provinsi Terbaik 1 dalam Pelaksanaan Program TBC Tahun 2024	 <p>The image shows a certificate from the Indonesian Ministry of Health (Kemenkes). It is titled 'Kemenkes PENGHARGAAN' and is for the 'PM.01.01/K/ 2024'. It is awarded to 'PROVINSI D. I. YOGYAKARTA' for being the 'Provinsi Terbaik 1' in the 'Pelaksanaan Program TBC Tahun 2024'. It is signed by dr. Yudi Pramono, MARS, on December 2, 2024.</p>



PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA